

# CITRA GORONTALO DALAM ARSIP



Arsip Nasional Republik Indonesia  
Jakarta, Juli 2009



Peta Provinsi Gorontalo  
 Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, 2008



Lambang Pemerintah Provinsi Gorontalo



Kantor Gubernur Gorontalo  
2009



Dr. Ir. H. Fadel Muhammad  
Gubernur Provinsi Gorontalo  
Periode 2007 – 2012



**Ir. H. Gusnar Ismail, MM**  
**Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo**  
**Periode 2007 – 2012**



H. Amir Piola Isa  
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo  
Periode 2004-2009



Drs. H. Idris Rahim, MM  
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo  
Tahun 2006 – sekarang



Musyawarah Pimpinan Daerah  
Provinsi Gorontalo, Juli 2009



Brigjen (Pol) Sunarjono  
Kepala Kepolisian Daerah  
Gorontalo



Kol. Istu Hari Subagyo  
Komandan Korem  
131 Santiago



Bambang Waluyo, SH.  
Kepala Kejaksaan Tinggi  
Gorontalo



Sjam Amansjah, SH.  
Ketua Pengadilan Tinggi  
Gorontalo

## Gubernur dan Penjabat Gubernur Provinsi Gorontalo 2001 - Sekarang



Tursandi Alwi  
Penjabat Gubernur  
Provinsi Gorontalo  
Periode 2001-2002



Dr. Ir. H. Fadel Muhammad  
Gubernur Provinsi Gorontalo  
Periode 2002-2007  
dan 2007-2012

Walikota/Bupati di Lingkungan Provinsi Gorontalo,  
Periode 2008-2013



H. Adhan Dambea  
Walikota Gorontalo



David Bobihoe Akib  
Bupati Gorontalo



H. Rusli Habibie  
Bupati Gorontalo Utara



Ismet Mile  
Bupati Bone Bolaango



Iwan Bokings  
Bupati Boalemo



H. Zainuddin Hasan  
Bupati Pohuwato

Lambang – Lambang Pemerintah Kota/Kabupaten  
Dalam Lingkungan Provinsi Gorontalo



Kota Gorontalo



Kabupaten Gorontalo



Kabupaten Gorontalo Utara



Kabupaten Bone Bolaango



Kabupaten Boalemo



Kabupaten Pohuwato

## Walikota Madya/Walikota Gorontalo Sampai Terbentuknya Provinsi Gorontalo, 1961-2013



R. Atje Slamet  
Walikota Praja Gorontalo  
1961-1963



Taki Niode  
Walikota Madya Gorontalo  
1963-1971



Jusuf Bilondatu  
Walikota Madya Gorontalo  
1971-1978



H.A. Nusi  
Walikota Madya Gorontalo  
1978-1983



Achmad Nadjamuddin  
Walikota Madya Gorontalo  
1983-1988



Joesoef Dalie  
Walikota Madya Gorontalo  
1988-1993



Achmad Arbie  
Walikota Madya Gorontalo  
1993-1998



Medi Batutihe  
Walikota Gorontalo  
1998-2003 dan 2003-2008



H. Adhan Dambea  
Walikota Gorontalo  
2008-2013

# Sambutan Kepala Arsip Nasional RI



## **SAMBUTAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang disandangnya, seperti yang telah dipatrikan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan nasional. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa: "Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset negara yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional yang perlu dipelihara dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya".

Gorontalo merupakan salah satu wilayah strategis di Indonesia, bukan saja daerah ini memiliki potensi Sumber Daya Alam yang bernilai ekonomis melainkan karena kekayaan budayanya menjadi objek wisata unggulan Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya hingga menjadi salah satu provinsi yang bernaung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diwarnai oleh berbagai dinamika baik sosial, ekonomi maupun politik. Dinamika tersebut juga terekam dalam arsip. Melalui khasanah arsip yang tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), maka disusunlah suatu program, yang disebut dengan Citra Daerah.

Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan suatu program pengungkapan kembali memori kolektif daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air dan mencegah disintegrasi bangsa dan sekaligus untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini didukung data dan fakta yang terkandung dalam arsip yang merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Melalui khasanah arsip tersebut dapat diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun

kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Materi Citra Daerah berasal dari arsip baik dalam bentuk teks, peta, dan foto sebagai satu kesatuan informasi yang menggambarkan sebuah dinamika kolektif menuju pembentukan bangsa dan negara Indonesia, yang terbentuk atas dasar kesadaran sejarah. Pengalaman sejarah suatu bangsa adalah riwayat hidup bangsa itu sendiri. Apapun pengalaman yang dialami, duka, nestapa, darah, nyawa, dan pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan serta membangun bangsa dan negara yang dicita-citakan bersama sebagai memori kolektif bangsa. Sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional, arsip tersebut menjadi bukti akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dan nasional yang merupakan gambaran tentang dinamika berbangsa dan bernegara dan sekaligus merupakan bahan bukti pertanggungjawaban nasional bagi generasi mendatang.

Mencermati tumbuhnya semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman akan makna pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berayun di tengah derasnya arus globalisasi. Dengan demikian semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif bagi kelangsungan kehidupan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya daerah yang pada gilirannya menjadi proses dinamika nasional.

Adanya keterbatasan penyajian materi sekiranya dapat dijadikan pelajaran berharga bagi penyempurnaan penyusunan Citra Daerah selanjutnya. Akhirnya dengan kehadiran Citra Daerah ini, diharapkan dapat merangsang tumbuhnya program lanjutan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Terima Kasih.

Jakarta, Juli 2009  
Kepala,

Djoko Utomo



## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Peta Provinsi Gorontalo	ii
Lambang Provinsi Gorontalo	iii
Kantor Gubernur Gorontalo	iv
Gubernur Provinsi Gorontalo Periode 2007-2012	v
Wakil Gubernur Periode 2007-2012	vi
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2004-2009	vii
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo	viii
Musyawarah Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo	ix
Gubernur dan Penjabat Gubernur Gorontalo 2001- sekarang	x
Walikota/Bupati di Provinsi Gorontalo	xi
Lambang-lambang Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Gorontalo	xii
Walikotamadya/Walikota Gorontalo hingga terbentuknya Provinsi Gorontalo	xiii
Sambutan Kepala ANRI	xiv
Daftar Isi	xvii
<b>PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang	2
B. Gambaran Sejarah	4
1. Letak Geografis dan Kondisi Sosial	4
2. Periode Sebelum Kedatangan Bangsa Eropa	6
3. Periode Kolonisasi Bangsa Eropa dan Jepang	7
4. Periode Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI	13
5. Gorontalo sebagai "Provinsi Jagung"	28
C. Arti Lambang Provinsi Gorontalo	31
D. Gorontalo dalam Khazanah Arsip	33
E. Daftar Pustaka	34
<b>CITRA GORONTALO DALAM ARSIP</b>	35
A. Geografi	36
B. Politik dan Pemerintahan	48
C. Perdagangan	89
D. Pertanian dan Perkebunan	97
E. Pertambangan	119
F. Perhubungan	124
G. Keagamaan	132
H. Kebudayaan	141
<b>DAFTAR ARSIP</b>	159
<b>PENUTUP</b>	176

# Pendahuluan

# CITRA GORONTALO DALAM ARSIP

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mewacanakan "daerah" sebagai kondisi dasar diharapkan akan membangun pemahaman kita tentang bangsa (*nation*), dan rasa kebangsaan (nasionalisme). Di masa lalu eksistensi daerah terbentuk karena ikatan kultural yang melekat pada wilayah dan masyarakatnya. Dalam perkembangannya eksistensi dan dinamika daerah diwujudkan pada kemandirian dan prakarsa daerah yang bersangkutan untuk memajukan masyarakat dan wilayahnya. Dalam konteks tersebut keberhasilan yang dicapai suatu daerah akan menjadi sumbangan bagi keberhasilan dalam membangun sebuah bangsa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah upaya dasar yang melandasi keotonomian di daerah. Otonomi Daerah pada hakekatnya adalah sebagai suatu upaya untuk meningkatkan peran daerah dalam memberikan dan mendekatkan layanan prima kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing secara optimal.

Hal lain yang cukup mendasar dengan penerapan otonomi daerah adalah berkenaan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, termasuk di dalamnya urusan kearsipan. Di samping itu, fungsi kearsipan adalah bahwa urusan untuk mengelola arsip statis di daerah beralih dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seperti diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 105 tahun 2004 tentang "Pengelolaan Arsip Statis". Untuk itu kepada Pemerintah Daerah perlu diberikan informasi mengenai peristiwa masa lalu tentang daerah masing-

masing yang terekam dalam arsip agar Pemerintah Daerah dapat mengembangkan upaya penyelamatan dan pelestarian arsip statis secara mandiri dan bertanggung jawab pada masa mendatang. Pemaknaan mengenai pentingnya masa lampau yang terekam dalam arsip harus dimaknai oleh kearifan lokal dan nasional dalam upaya mempertahankan nilai-nilai martabat bangsa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembentukan *nations and character building* sesuai cita-cita dan nilai-nilai luhur bangsa.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Arsip Nasional Republik Indonesia ikut serta berperan aktif untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah tersebut melalui suatu Program Citra Daerah.

Dengan semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat memberikan informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meluruskan dan meningkatkan pemahaman kita akan makna tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif dan bukan disintegratif terhadap tatanan sosial budaya maupun politik kenegaraan.

Program Citra Daerah yang dikembangkan Arsip Nasional RI sejak tahun 2003 dilaksanakan dalam bentuk penyerahan hasil alihmedia (berupa *hard copy* dan *soft copy*) dari khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI kepada seluruh provinsi di Indonesia. Salah satu provinsi yang menerima Citra Daerah pada tahun 2009 ini adalah Provinsi Gorontalo.

Arsip mengenai Gorontalo yang terdapat dalam naskah Citra Daerah ini mencakup kurun waktu mulai awal abad ke-17 sampai dengan abad ke-20, yaitu sejak masa *Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)* sampai dengan masa Republik Indonesia. Arsip tersebut berisikan informasi tentang berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi di Gorontalo pada periode tersebut. Citra Gorontalo dalam arsip ini diharapkan dapat memupuk rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagi

masyarakat Gorontalo pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

## **B. Gambaran Sejarah**

### **1. Letak Geografis dan Kondisi Sosial**

Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000. Luas wilayah Provinsi Gorontalo sekitar 12.215,45 km<sup>2</sup> atau 47% dari seluruh luas wilayah Sulawesi Utara (ketika Gorontalo masih merupakan bagian dari Sulawesi Utara sebelum membentuk provinsi tersendiri). Secara geografis, batas-batas wilayah Provinsi Gorontalo, antara lain:

- sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi,
- sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini,
- sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara, dan
- sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah.

Secara astronomis Provinsi Gorontalo berada pada 1°-4° Lintang Utara dan 120° – 124° Bujur Timur.

Provinsi Gorontalo mempunyai ketinggian antara 0 - 2.400 meter di atas permukaan laut dan secara umum mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan terbanyak biasanya terjadi pada bulan Maret, Mei dan Oktober dengan curah hujan rata-rata 207,7 mm dan suhu rata-rata 23°C - 31°C. Sedangkan tekanan udara berkisar antara 11.12,5 MOB dengan kecepatan angin rata-rata 1,9 knot.

Luas laut teritorial Provinsi Gorontalo sekitar 10.500 km<sup>2</sup> dan luas perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekitar 40.000 km<sup>2</sup> yang ada di perairan sebelah utara. Total luas perairan yang dimiliki Provinsi Gorontalo sekitar 50.500 km<sup>2</sup>. Secara geografis wilayah perairan Gorontalo berhadapan dengan perairan Pasifik, sehingga menghadap ke Korea, Jepang dan Amerika Latin.

Penduduk Provinsi Gorontalo berjumlah 884.737 jiwa (Tahun 2003) dan meningkat menjadi 887.000 jiwa pada tahun 2004. Beberapa etnik yang ada di Provinsi Gorontalo antara lain, Suku Gorontalo, Bugis, Polahi, Jawa, Makassar, Bali dan

Minahasa. Bahasa daerah yang digunakan umumnya bahasa Gorontalo. Penduduk Gorontalo menganut berbagai agama dan kepercayaan, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan kepercayaan asli (animisme-dinamisme). Mata pencaharian penduduk Provinsi Gorontalo pada umumnya di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Potensi ekonomi Provinsi Gorontalo cukup penting antara lain bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan pertambangan. Pertanian dan kehutanan sekitar 1,5 juta hektar. Luas lahan pertanian sekitar 24.000 hektar dan perkebunan sekitar 250.000 hektar menjadikan potensi pertanian cukup penting, baik untuk ketahanan pangan penduduk setempat maupun untuk dijual ke luar Gorontalo.

Pola agribisnis di bidang budidaya tanaman jagung telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Sejak dikembangkan jagung hibrida, ekspor jagung terus meningkat, sehingga pada tahun 2008 produksinya mencapai 500.000 ton dan 177,182 ton dipasarkan ke luar Gorontalo. Dari produksi tersebut, 79.385 ton diekspor ke Malaysia, Filipina, Korea Selatan dan sisanya dipasarkan ke Jakarta, Surabaya dan Medan. Pola agribisnis tersebut sedang dicoba dikembangkan di bidang produksi pertanian lainnya.

Gorontalo juga sudah lama terkenal dengan produk ekspornya, antara lain ikan laut, kayu, minyak kelapa, kemiri, cacao, cengkeh dan jagung. Potensi peternakan seperti kambing, juga menjadi salah satu primadona perdagangan antar pulau di wilayah Indonesia Timur. Kondisi perikanan dan kelautan Gorontalo menunjukkan potensi yang cukup penting. Panjang pantai sekitar 500 km dan diapit oleh laut Sulawesi dan Teluk Tomini serta jenis ikan yang beraneka ragam, seperti ikan tuna, cakalang, cumi-cumi, kepiting, udang dan sebagainya menjadikan potensi perikanan yang cukup penting dan menarik investor ke wilayah Gorontalo. Selain perikanan, kondisi alam provinsi Gorontalo juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi industri pariwisata.

Provinsi Gorontalo juga memiliki potensi pertambangan yang penting, seperti emas, tembaga, batu granit, lempung, zeolit, batu gamping dan sebagainya. Di samping itu, Teluk

Tomini juga masih menyimpan cadangan minyak bumi dan gas yang cukup besar dan belum diolah secara optimal.

## **2. Periode Sebelum Kedatangan Bangsa Eropa**

Kondisi geografis yang strategis dan sumber ekonomi yang cukup melimpah menjadikan Provinsi Gorontalo cukup penting, baik dari segi politik maupun ekonomi. Kondisi tersebut telah menarik berbagai pihak luar untuk menguasai wilayah Gorontalo, termasuk Belanda. Sejak sebelum kedatangan bangsa Barat ke Sulawesi, ada beberapa kota tua di Sulawesi yang cukup dikenal di Nusantara, antara lain Makassar, Pare-Pare, Manado dan Gorontalo. Kota Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di wilayah Indonesia Timur, selain Ternate dan Bone. Agama Islam menyebar seiring dengan meningkatnya perdagangan di wilayah tersebut. Letaknya yang strategis, baik di bidang politik maupun ekonomi, mejadikan Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan untuk wilayah sekitarnya, seperti Bolaang Mongondow (Sulawesi Utara), Buol Toli-Toli, Luwuk, Banggai, Donggala (Sulawesi Tengah) dan Sulawesi Tenggara.

Nama "Gorontalo" diperkirakan berasal dari kata Hulontalangi, yang artinya "lebih mulia". Kemudian berkembang menjadi Horondalo dan bila ditulis dalam ucapan bahasa Belanda adalah Gorontalo. Pusat Kerajaan Gorontalo pada awalnya berada di daerah Huwaia di dekat Sungai Bolango. Pada tahun 1024 H pindah ke daerah Duingingi (Kota Barat sekarang). Kemudian pada masa pemerintahan Sultan Botutihe pindah lagi ke dekat Sungai Bolango, di sekitar daerah Biawao dan Limba. Pada saat itu Kerajaan Gorontalo cukup disegani di wilayah sekitarnya, seperti Bolaang Mongondow, Buol Toli-Toli dan Donggala. Pada saat itu daerah Gorontalo terdiri dari beberapa kerajaan yang diatur menurut tata hukum adat setempat dan terikat dalam suatu ikatan kekerabatan yang disebut "*Limo lo Pohala'a*", yang terdiri dari lima pohala'a, yaitu;

1. Pohala'a Gorontalo
2. Pohala'a Limboto
3. Pohala'a Boalemo

4. Pohala'a Suwawa
5. Pohala'a Atingola

Hukum adat yang berlaku di Gorontalo adalah kesatuan hukum adat dengan agama (Islam), yaitu "**Adat bersendikan Syara dan Syara bersendikan Kitabullah**". Dengan hukum adat tersebut menjadikan Gorontalo termasuk 19 wilayah adat di Indonesia. Kelima kerajaan tersebut lebih menekankan ikatan kekerabatan, karena menganggap berasal dari nenek moyang yang sama, sehingga tidak mengikat diri dalam suatu konfederasi politik yang didominasi oleh satu kerajaan di wilayah itu.

Kondisi tersebut lama kelamaan berubah apalagi ketika ekspansi pihak asing datang ke Gorontalo. Hubungan kelima kerajaan tersebut tidak selalu mulus. Kepentingan politik dan ekonomi sering kali mewarnai konflik diantara mereka, yang akhirnya mengundang kekuatan pihak luar untuk campur tangan dan menguasai wilayah Gorontalo.

### **3. Periode Kolonialisasi Bangsa Eropa dan Jepang**

Kedatangan bangsa Barat ke Gorontalo dan wilayah Timur Nusantara umumnya berkaitan erat dengan kondisi politik dan ekonomi di belahan dunia lain, terutama akibat jatuhnya Kota Konstantinopel di pantai Bosporus ke tangan Kesultanan Turki pada tahun 1453. Sejak saat itu mulailah bangsa Barat yang memerlukan rempah-rempah melakukan penjelajahan dan mencari wilayah Timur Hindia.

Kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke Nusantara berkaitan erat dengan perjanjian Tordiselas pada tahun 1498 yang difasilitasi oleh Paus sebagai pimpinan tertinggi umat Katolik. Perjanjian tersebut antara lain menyebutkan bahwa Portugis akan bergerak ke arah Timur dan Spanyol ke arah Barat untuk melakukan misi agama dan mencari sumber rempah-rempah yang diperlukan bangsa Barat. Kemudian semboyan petualangan mereka lebih dikenal dengan istilah Tiga G, yaitu Gold (kekayaan/ekonomi), Gospel (agama) dan Glory (kejayaan/politik).



Misi penyebaran agama Katolik yang semula menjadi tujuan utama Portugis dan Spanyol menjadi bergeser ke masalah politik dan ekonomi. Perebutan pengaruh politik dan ekonomi di daerah yang didudukinya mengakibatkan konflik kedua negara, termasuk di wilayah Maluku dan Sulawesi. Konflik antara Spanyol dan Portugis kembali diselesaikan dengan difasilitasi Paus dengan Perjanjian Saragosa.

Jatuhnya kerajaan Malaka sebagai pusat perdagangan di Nusantara ke tangan Portugis pada tahun 1511 mendorong para pedagang pribumi pindah ke Banten dan wilayah timur, antara lain wilayah Maluku dan Sulawesi. Portugis pun terus bergerak ke arah timur untuk menguasai perdagangan di wilayah tersebut. Pada saat itu di wilayah Timur Nusantara sudah ada beberapa kerajaan pribumi yang cukup disegani dan mengontrol wilayah itu, antara lain Kesultanan Ternate dan Tidore. Kemudian berkembang juga Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan yang juga tengah memperluas pengaruhnya ke wilayah Timur dan Utara. Ternate dan Tidore bersaing untuk merebut pengaruh politik dan ekonomi di wilayah Timur Nusantara. Pada saat bersamaan bangsa Spanyol sudah menanamkan kekuasaannya di Filipina dan berusaha meluaskan pengaruhnya ke Sulawesi dan Maluku.

Letak geografis Gorontalo yang strategis dan Kekayaan alam yang dikandungnya turut mendorong bangsa Spanyol tertarik untuk menguasai wilayah Sulawesi, termasuk Gorontalo. Berita para pedagang tentang melimpahnya rempah-rempah di Maluku semakin mendorong bangsa Spanyol dan Portugis saling berebut pengaruh di wilayah tersebut. Hubungan Ternate dengan Gorontalo dan negara-negara yang tergabung dalam *Limo lo Pohalaa* terjalin sekitar satu abad sebelum Baabullah menjadi Sultan Ternate.

Pada tahun 1570-an, terjadi pernikahan besar antara Sultan Ternate, Baabullah dengan Ratu Gorontalo yang bernama Ulango yang bercerai dengan Raja Gorontalo yang bernama Amai. Perceraian tersebut dipicu oleh Penyerahan kekuasaan dari Raja Amai kepada anak Motolodulahu. Pada saat terjadi konflik antara Raja Gorontalo, Motolodulahu dengan Raja Humogilae dari Limboto, Kerajaan Ternate memihak pada Limboto dan pasukan Gorontalo dapat dipukul mundur.

Gorontalo kemudian meminta bantuan kepada Kerajaan Gowa untuk menghadapi koalisi Limboto-Ternate. Hal ini tentu mengakibatkan perebutan pengaruh antara Ternate dan Gowa di pesisir Sulawesi Utara.

Pada tahun 1605 VOC mengadakan kontak dengan Ternate dan berhasil mendapat jaminan pasokan rempah-rempah dan sebagai imbalannya VOC akan membantu Ternate dari serangan musuh-musuhnya, termasuk Kerajaan Gowa dari Sulawesi Selatan yang sedang berusaha meluaskan pengaruhnya ke Sulawesi Utara. Koalisi Ternate-VOC akhirnya mengalahkan Kerajaan Gowa dengan ditandatanganinya Perjanjian Bongaya pada tahun 1667 dimana salah satu pasalnya menyebutkan bahwa wilayah pesisir Sulawesi Utara, termasuk Gorontalo diserahkan kepada Kerajaan Ternate.

Sejak saat itu, Gorontalo, Limboto dan *Limo lo Pohalaa* berada di bawah kekuasaan Ternate. Kerajaan-kerajaan di *Limo lo Pohalaa* wajib mengirim upeti kepada Ternate dan setiap pengangkatan raja di wilayah itu harus seizin dari Ternate. Model struktur pemerintahan di *Limo lo Pohalaa* kemudian meniru model Kerajaan Ternate, misalnya pembentukan pembantu sebagai pelaksana harian pemerintahan yang disebut Jogugu. Struktur pemerintahan di bawah raja yang semula *Olea lo lipu* dan *Tandaa* (kepala negori) diganti dengan istilah yang berlaku di Ternate, yaitu *Marsaoleh* dan *Kimafaha*. Pada saat itu juga dibentuk armada laut untuk kepentingan perdagangan dan keamanan. Pimpinan armada yang ditunjuk diberi jabatan *kapitan fao* (kapten laut).

Gorontalo dan Limboto berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Ternate dengan memohon bantuan VOC yang berkedudukan di Manado, tetapi ditolak, karena kekuasaan Ternate di *Limo lo Pohalaa* atas seizin VOC. Perkembangan politik dan ekonomi berikutnya mendorong penyerahan Gorontalo kepada VOC melalui perjanjian antara Gubernur VOC, Robertus Padtbrugge dengan Sultan Ternate Sibori Amsterdam pada tanggal 11 Mei 1677 di Benteng Oranje, Ternate. Salah satu pertimbangan VOC adalah upaya membendung pengaruh Spanyol yang sudah mendekati beberapa kerajaan di Sulawesi Utara dan untuk menjamin keamanan jalur perdagangan VOC dari para perompak.

Beberapa ketentuan tentang Kontrak Politik antara VOC dengan Gorontalo-Limboto tahun 1677 adalah:

1. Sungai Gorontalo harus dibuka untuk jalur perdagangan VOC;
2. Pengangkatan raja-raja Gorontalo dan Limboto harus seizin VOC;
3. Dilarang melakukan perdagangan kerbau, kecuali untuk alat pengangkutan (transportasi);
4. Gorontalo dan Limboto harus mengirimkan upeti berupa kelapa, kentang, gandum, ubi, katun, damar, rotan, keranjang dan bahan tali;
5. VOC memperoleh hak untuk menjaga stabilitas harga rempah-rempah;
6. Gorontalo dan Limboto wajib menjaga keamanan pada jalur perdagangan VOC dari gangguan para perompak.

Kontrak politik antara Gorontalo-Limboto dengan VOC diperbaharui lagi pada tanggal 25 Maret 1678 yang ditandatangani oleh Gubernur Robertus Padtbrugge dengan Gorontalo (diwakili oleh Raja Dibawah Kuicil Bya) dan Limboto (diwakili Kuicil Golade dan Kapten Laut Kuicil Pomaele) di Benteng Oranje, Ternate. Isi perjanjian tersebut terdiri 24 pasal yang isinya antara lain sebagai berikut:

1. Gorontalo dan Limboto mengakui dan tunduk kepada VOC dan menerima wewenang untuk memerintah wilayahnya atas nama VOC;
2. Pengangkatan raja-raja Gorontalo dan Limboto harus seizin VOC;
3. Perselisihan antara Gorontalo dengan Limboto atau kerajaan lain harus diselesaikan melalui VOC;
4. Gorontalo dan Limboto dilarang berhubungan dengan pihak luar, baik dengan bangsa Eropa maupun pribumi;
5. Gorontalo dan Limboto harus membantu peperangan melawan musuh-musuh VOC;
6. Gorontalo dan Limboto harus menolak dan menangkap para misionaris Katolik (termasuk dari Spanyol dan Portugis) di wilayahnya. Sebaliknya, Gorontalo dan

- Limboto harus membuka wilayahnya bagi para Zending untuk penyebaran agama Kristen Protestan;
7. Gorontalo wajib menyerahkan sebagian panen hasil buminya dan kulit kerang ke VOC di Ternate dengan harga yang ditentukan oleh VOC.

Isi perjanjian tersebut sangat merugikan Gorontalo dan Limboto sehingga timbul perlawanan terhadap VOC. Perlawanan yang dilakukan oleh Gorontalo dan Limboto sangatlah tidak seimbang dengan kekuatan armada VOC pada masa itu, sehingga perlawanan tersebut dapat dipatahkan oleh VOC. Raja Bya ditangkap dan akhirnya dibuang ke Afrika Selatan, kemudian dipindahkan lagi ke Ceylon.

Sejak tahun 1824, wilayah Gorontalo praktis dikuasai penuh oleh pemerintah Kolonial Belanda, dan pemerintahan dipimpin oleh seorang Asisten Residen Belanda. Struktur pemerintahan Gorontalo mengalami perubahan lagi pada tahun 1911, yang dibagi menjadi tiga *onder-Afdeeling*, yaitu.

- a. *Onder-Afdeeling* Gorontalo
- b. *Onder-Afdeeling* Kwandang
- c. *Onder-Afdeeling* Boalemo

Pada tahun 1920, wilayah Gorontalo mengalami perubahan lagi dan dibagi menjadi 5 distrik, yaitu:

- a. Distrik Limboto
- b. Distrik Kwandang
- c. Distrik Gorontalo
- d. Distrik Bone
- e. Distrik Boalemo

Sejak tahun 1922 Gorontalo berubah lagi menjadi tiga *Afdeeling*, yaitu:

- a. *Afdeeling* Gorontalo
- b. *Afdeeling* Boalemo
- c. *Afdeeling* Buol

Menjelang akhir masa kolonialisasi Belanda di Indonesia, struktur administrasi pemerintahan di wilayah Timur Kepulauan Indonesia berubah lagi dengan dibentuknya *Gouvernement Groot Oost* atau Pemerintah Wilayah Timur Besar (setingkat provinsi) yang berkedudukan di Makassar (*Hoofdplaats*

*Makassar*). Berdasarkan Staatsblad Tahun 1938 Nomor 352, pada tahun 1939. Gubernur *Gouvernement Groot Oost* dijabat oleh G.A.W. Ch. De Haze Winkelman, yang membawahi beberapa karesidenan, antara lain sebagai berikut.

1. Karesidenan *Celebes en Onderhorigheden* yang berkedudukan di Makassar, Residennya dijabat oleh Ch.H. Ter Laag;
2. Karesidenan Manado yang berkedudukan di Manado, Residennya dijabat oleh M. Van Rhijn;
3. Karesidenan Molukken (Maluku) yang berkedudukan di Ambon, Residennya dijabat oleh H.J. Jansen;
4. Karesidenan *Timor en Onderhorigheden* yang berkedudukan di Kupang;
5. Karesidenan Bali en Lombok yang berkedudukan di Denpasar.

Sementara Karesidenan Manado sendiri terdiri dari lima *Afdeeling*, yaitu:

1. *Afdeeling* Manado,
2. *Afdeeling* Sangihe en Talaud Eilanden,
3. *Afdeeling* Gorontalo,
4. *Afdeeling* Donggala dan
5. *Afdeeling* Poso.

*Afdeeling* Gorontalo dikepalai oleh seorang Asisten Residen yang pada tahun 1939 dijabat oleh B. Korn. *Afdeeling* Gorontalo sendiri dipecah lagi menjadi beberapa *onder-afdeeling*, yaitu:

1. *Onder-Afdeeling* Gorontalo yang dikepalai oleh seorang *Controleur* yang bernama Dr. A.J.W. Bruckel;
2. *Onder-Afdeeling* Boalemo (Tilamoeta), dijabat oleh seorang *Controleur* bernama Dr. A.B. Brucjel;
3. *Onder-Afdeeling* Boeol (Leok), dikepalai oleh seorang *Gezaghebber* yang bernama Mr, M.H. Van Capelle.

*Onder-Afdeeling* Gorontalo dibagi lagi menjadi beberapa distrik yang dikepalai oleh *Hoofd van District*, yaitu:

1. Distrik Gorontalo
2. Distrik Limboto
3. Distrik Kwandang
4. Distrik Soewawa

Beberapa distrik yang dipimpin oleh penguasa pribumi disebut "*Jogugu*" dan *onder-district* dikepalai oleh *Marsaote (camat)*. Sistem pemerintahan di Gorontalo ini berlangsung sampai meletus Perang Dunia II. Kekuasaan Kolonial Belanda di bidang Politik, Ekonomi dan sosial budaya telah mengakibatkan penderitaan rakyat Gorontalo, yang berkepanjangan, sehingga muncul beberapa perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda yang dipimpin oleh tokoh-tokoh setempat. Salah satu perlawanan yang dapat dicatat adalah perlawanan yang dipimpin oleh Nani Wartabone dan Kusno Danupoyo yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 23 Januari 1942, sekitar 2 bulan sebelum Jepang menduduki wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah Gorontalo. **Gerakan Merah Putih** yang dipimpin oleh **Nani Wartabone** mendapat sambutan luas segera setelah gerakan tersebut didirikan.

**Gerakan Merah Putih** juga segera menyebar ke Sulawesi. **Nani Wartabone** mengirimkan utusan ke berbagai daerah agar rakyat di daerah-daerah tersebut secara serentak berusaha merebut perebutan kekuasaan begitu tentara Jepang menyerah kepada Sekutu.

Kesadaran politik yang telah tumbuh di kalangan masyarakat Sulawesi Utara memepercepat berakhirnya kekuasaan Belanda. Maka ketika pasukan Jepang mendarat di Manado pada tanggal 11 Januari 1942, Belanda sudah dalam keadaan terjepit dan akhirnya menyerah tanpa banyak melakukan perlawanan.

Di Sulawesi Utara bala tentara Jepang mendarat pada tanggal 11 Januari 1942 di tiga tempat yaitu di pangkalan udara Kalawiran (Kakas), di pantai utara dan selatan kota Manado serta di negeri Kema.

Kedatangan Jepang mulanya disambut baik oleh rakyat yang merasa tertekan oleh penjajahan Belanda. Propaganda-propaganda Jepang sebagai "saudara tua" bangsa Indonesia sepertinya memberi harapan baru bagi rakyat. Tetapi hal ini ternyata segera berubah begitu Jepang mulai melaksanakan pemerintahannya. Kegiatan rakyat semakin ditekan dan kehidupan semakin sulit dan bahkan sampai terjadi kelaparan di Makalehi, sehingga menimbulkan perlawanan rakyat pada tahun

1944-1945. **Gerakan Merah Putih** merupakan motor penggerak aksi perlawanan tersebut.

Pemerintahan militer Jepang sendiri ternyata tidak berjalan lancar, serangan-serangan pasukan sekutu semakin gencar. Pada tahun 1944 Kota Manado dihujani bom oleh tentara sekutu sehingga pusat pemerintahan militer Jepang terpaksa dipindahkan ke Tondano. Di kota Tondano ini pulalah pada tanggal 8 Oktober 1945 Jepang menandatangani piagam penyerahan kepada tentara Sekutu.

Segera setelah pemerintah Jepang menyerah tak bersyarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, suatu peristiwa bersejarah yang segera disambut dengan Proklamasi Kemerdekaan oleh Bung Karno dan Bung Hatta di Jakarta, tokoh-tokoh pergerakan di Sulawesi Utara mendesak kepada pemerintah militer Jepang agar menyerahkan kekuasaannya kepada putra-putri Indonesia.

#### **4. Periode Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI**

Semula permintaan tokoh-tokoh pergerakan dan pemuda ini dipenuhi oleh pimpinan militer Jepang di Sulawesi Utara Laksamana *Syuntizi Hamanaka*. Karena itulah pada tanggal 22 Agustus 1945 di Wisma Lewet Tondano diadakan upacara perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Gubernur Sulawesi adalah *Dr. G.S.S.J. Ratulangi* dan Residen Sulawesi Utara adalah *E.H.W. Pelonkahu* yang menjabat pula sebagai Ketua Badan Pemerintahan Sulawesi Utara.

Tetapi suasana yang penuh kegembiraan ini segera berubah menjadi pekik perjuangan ketika tentara Sekutu mendarat dan pemerintah pendudukan Jepang menandatangani penyerahan kekuasaan kepada Sekutu pada tanggal 8 Oktober 1945 di Tondano. Pendudukan militer Sekutu ternyata diikuti pula oleh pasukan Belanda dan petugas-petugas *Netherland Indies Civil Administration* (NICA) yang disertai wewenang oleh pimpinan tentara Sekutu untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Sudah barang tentu kedatangan kembali kolonial Belanda ini membuat rakyat menjadi gusar dan marah. Tokoh-

tokoh pergerakan dan pemuda membentuk wadah-wadah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Di Kepulauan Sangihe Talaud, misalnya, dibentuk Partai Rakyat Indonesia (PARI) dan Barisan Pemuda Republik Indonesia (BPRI). Demikian pula di daerah-daerah lainnya, seperti di Minahasa.

Pada tanggal 14 Februari 1946 anggota Kompi 7 KNIL bersama para pemuda mencoba merebut perebutan kekuasaan dengan kekuatan senjata di markas KNIL Manado. Tindakan berani ini membakar timbulnya perlawanan-perlawanan terhadap kolonial Belanda. Namun tentara Belanda dengan susah payah berhasil mematahkan perlawanan rakyat. Rangkaian pertempuran tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 11 Maret 1946, suatu peristiwa yang dicatat dengan tinta merah sebagai "*Aksi Kapten J. Kaseger*".

Sementara itu untuk dapat tetap mempertahankan kekuasaannya di Indonesia, Gubernur Jenderal Belanda H.J. van Mook melahirkan gagasan pembentukan suatu negara serikat atau federasi. Gagasan ini dicetuskan karena Belanda menyadari bahwa untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia seperti sebelum perang (PD II) adalah tidak mungkin sama sekali. Karena itu usaha untuk meruntuhkan Negara Republik Indonesia harus dilakukan dengan politik pecah belah melalui pembentukan negara serikat.

Untuk melaksanakan maksudnya ini, Van Mook menyelenggarakan *Konferensi Malino* di sebuah kota kecil Malino di sebelah tenggara Makassar pada tanggal 15-25 Juli 1946. Hasil-hasil Konferensi Malino kemudian dimatangkan lagi pada *Konferensi Denpasar*, Bali, yang diselenggarakan dari tanggal 24 sampai 28 Desember 1946. Dalam Konferensi Denpasar inilah dirumuskan pembentukan negara-negara bagian dari negara serikat yang akan didirikan tersebut.

Dalam Konferensi Denpasar itu dibentuk negara bagian yang pertama, yaitu Negara Indonesia Timur (NIT), yang wilayahnya meliputi 13 daerah: Sulawesi Utara, Minahasa, Kepulauan Sangihe Talaud, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Bali, Lombok, Timor, Sumbawa, Sumba, Flores, Maluku Utara, dan Maluku Selatan.



Dengan terbentuknya Negara Indonesia Timur pada tanggal 24 Desember 1946, Sulawesi Utara (termasuk Gorontalo) menjadi salah satu negara bagiannya, Status tersebut bertahan sampai terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat (RIS) dan terlaksananya pengakuan kedaulatan RIS oleh Kerajaan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949.

Di wilayah Sulawesi Utara pengakuan kedaulatan disambut oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional dan seluruh rakyat dengan penuh kegembiraan dan harapan. Di Minahasa upacara pengakuan kedaulatan dilakukan oleh pejabat NICA (Belanda) kepada pejabat RIS (Republik Indonesia Serikat). Sedangkan untuk daerah Bolaang Mongondow baru dapat dibebaskan dari kekuasaan kolonial Belanda pada bulan Mei 1950. Pada saat itu kesatuan laskar Republik Indonesia yang berpusat di Tomohon di bawah pimpinan *E. Mondong* melaksanakan tugas pengambilalihan kekuasaan di daerah Bolaang Mongondow untuk kemudian menyerahkannya kepada *H.J. Kaligis* selaku Komandan Laskar Rakyat Indonesia di Kotamobagu. Gerakan ini kemudian disusul dengan gerakan pasukan *Macan Putih* dan pendaratan *Batalion Worang*.

Sesudah negara RIS terbentuk, mulai terasa atmosfer kebebasan bagi rakyat untuk menyuarakan tuntutan sanubarinya. Maka belum genap RIS berumur satu tahun rakyat di daerah Sulawesi Utara segera menuntut pembubaran Negara Indonesia Timur (NIT) dan peleburan wilayahnya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal 19 Mei 1950 antara Pemerintah RIS dan Pemerintah RI tercapai persetujuan untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah melalui beberapa kali persidangan, maka pada tanggal 15 Agustus 1950 diterbitkanlah *Undang-Undang RIS nomor 7 tahun 1950* tentang perubahan UUD RIS menjadi UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara).

Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1950, bertepatan dengan ulang tahun kelima Republik Indonesia, dinyatakan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta pembubaran RIS. Sejak itu Pemerintah Republik Indonesia Provinsi Sulawesi kembali mulai melaksanakan tugas-tugasnya.

Sebagai pejabat Gubernur Sulawesi ditunjuk **B.W. Lapijan** yang bertugas dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 1 Juli 1951. Selanjutnya pada tanggal 4 Juli 1951, jabatan gubernur permanen Provinsi Sulawesi dipegang oleh **Sudiro**.

Dalam perkembangan selanjutnya, Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua Provinsi administratif yaitu Provinsi Sulawesi Utara-Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara melalui **Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 1960**.

Setelah Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, wilayah Indonesia dibagi ke dalam 9 Provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo (Kalimantan), Kepulauan Sunda Kecil, Sulawesi dan Maluku. Kedatangan tentara Sekutu ke Indonesia yang diboncengi Nederlands Indie Civil Administration (NICA) mengakibatkan perubahan politik baru, karena NICA berusaha menjajah dan membentuk pemerintahan kolonial seperti zaman sebelum pendudukan Jepang.

Beberapa perjanjian antara RI dengan Belanda dilakukan, seperti Perjanjian Linggajati (1946), Perjanjian Renville (1948) dan Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 telah merugikan Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berubah menjadi bentuk negara federal Republik Indonesia Serikat (RIS). Wilayah Timur Indonesia pun berubah menjadi Negara Indonesia Timur (NIT), sehingga wilayah Sulawesi (termasuk Gorontalo dan sekitarnya), Maluku dan Kepulauan Sunda Kecil dikembalikan pada penataan wilayah administrasi seperti pada masa pendudukan Belanda.

Perjuangan bangsa Indonesia terus berlanjut, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah kembali ke NKRI, penataan wilayah Gorontalo terus berkembang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1953, Sulawesi Utara menjadi suatu daerah Otonom. Kemudian pada tahun 1954 daerah Bolaang Mongondow berdiri sendiri sebagai daerah otonom, sehingga Sulawesi Utara hanya meliputi bekas kawasan Gorontalo dan Buol yang berpusat di Gorontalo. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, Gorontalo dibagi menjadi daerah tingkat

II yang meliputi Daerah Kotapraja Gorontalo dan Daerah Tingkat II setelah dikurangi daerah Swapraja Buol. Gorontalo resmi dibentuk menjadi Kotapraja pada tanggal 20 Mei 1960. Kemudian sejak tahun 1965, Gorontalo berubah menjadi Kotamadya.

Pada masa Reformasi tahun 1998, yang disusul dengan kebebasan berpolitik yang lebih baik, muncul keinginan dari masyarakat Gorontalo untuk membentuk provinsi sendiri, lepas dari Provinsi Sulawesi Utara. Pembentukan Provinsi Gorontalo akhirnya terwujud dengan disyahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000. Pada tanggal 16 Februari 2001 Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Surjadi Sudirdja meresmikan Provinsi Gorontalo sebagai provinsi ke-32 sekaligus melantik Tursandi Alwi (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah) sebagai Penjabat Gubernur. Setahun kemudian, Ir. Fadel Muhammad terpilih menjadi Gubernur Provinsi Gorontalo. Pada awal pembentukannya, Provinsi Gorontalo merupakan gabungan dari tiga daerah, yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo. Setelah resmi menjadi Provinsi Gorontalo yang memiliki kelengkapan pemerintahan, Provinsi Gorontalo kemudian memekarkan daerahnya menjadi 6 (enam) pemerintah daerah, yang terdiri dari 1 Kota dan 5 Kabupaten, yaitu:

1. Kabupaten Boalemo dengan ibukota Marisa/Tilamuta
2. Kabupaten Bone Bolango dengan ibukota Suwawa
3. Kabupaten Gorontalo dengan ibukota Gorontalo
4. Kabupaten Gorontalo Utara dengan ibukota Kwandang
5. Kabupaten Pohuwato dengan ibukota Marisa, dan
6. Kota Gorontalo

## C. ARTI LAMBANG PROVINSI GORONTALO



1. Lambang Daerah Provinsi Gorontalo pada bagian luar berbentuk perisai atau jantung yang memberi makna kesetiaan sebagai pelindung kehidupan rakyat Gorontalo;
2. Lambang Daerah Provinsi Gorontalo pada bagian dalam berbentuk bulat lonjong atau bulat telur yang memberi makna adanya gagasan, ide atau cita-cita yang indah, yang kelak menetas menjadi sesuatu kesejahteraan hidup rakyat Gorontalo;
3. Lambang Daerah Provinsi Gorontalo dengan bentuk dalam yang menampakkan keserasian formasi gambar yang terdiri dari warna putih di tengah dan diikuti oleh posisi padi - bintang, kapas - rantai memberi makna adanya keteraturan adat, agama, hukum dalam semua pola kehidupan masyarakat.
- 4 Lambang Daerah Provinsi Gorontalo dapat dibuat dalam berbagai ukuran sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dimana lambang tersebut ditempatkan
- 5 Lambang Daerah Provinsi Gorontalo memiliki nuansa global
  - a. Warna biru keunguan adalah warna yang memberi makna tenang, setia dan selalu ingin mempertahankan kebenaran dan harapan masa depan yang cerah
  - b. model pohon kelapa yang melengkung memberi makna gerak dinamis dan tidak diam tetapi selalu berbuat untuk masa depan
  - c. Sayap maleo yang mengembang memberi makna dinamika siap untuk tinggal landas dan siap bersaing
  - d. Buku yang terbuka melambangkan keinginan masyarakat untuk siap meraih prestasi dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Iman dan Taqwa secara terus menerus

- e. Bintang mengandung makna global jika dikaitkan dengan cita-cita yang tinggi yaitu "Gantungkan cita-cita setinggi bintang di langit"
  - f. Pita mempunyai makna keinginan masyarakat Gorontalo untuk menyerap, merekam dan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi
- 6 Lambang Daerah Gorontalo memiliki nuansa Nasional
- a. Padi dan Kapas yang mengandung makna kemakmuran dan kesejahteraan seperti pada Pancasila
  - b. Rantai mempunyai makna adanya pengakuan persatuan dan kesatuan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika
- 7 Lambang daerah Gorontalo memiliki nuansa lokal
- a. Bintang adalah lambang keagamaan, sehingga selaras dengan filosofi "Adat bersendikan syara, syara bersendikan Kitabullah"
  - b. Benteng
  - c. Rantai mempunyai makna adanya pengakuan persatuan dan kesatuan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika
- 8 Pemaknaan warna dan simbol-simbol lainnya dalam lambang
- a. Simbol rantai yang memberi makna pada peristiwa patriotik
    - Rantai yang berjumlah 23 butir melambangkan tanggal 23 Januari
    - Kapas yang berjumlah 19 buah dan padi berjumlah 42 butir melambangkan tahun 1942
  - b. Sayap maleo yang berjumlah 16 helai melambangkan lahirnya Provinsi Gorontalo pada tanggal 16 Februari 2000
  - c. Warna :
    1. Hijau mempunyai makna kesuburan
    2. Kuning Mempunyai makna keagungan dan Kemuliaan
    3. Putih bermakna Kesucian dan Keluhuran
    4. Merah mempunyai makna keberanian dan perjuangan

#### **D. GORONTALO DALAM KHAZANAH ARSIP**

Beragam arsip ditampilkan dalam Khazanah Citra Daerah Gorontalo. Khazanah kearsipan yang ditampilkan meliputi arsip-arsip mengenai arsip *Geografi* dan *Pemandangan Alam* Gorontalo. Penjelasan keadaan alam kawasan ini digambarkan melalui beberapa peta gorontalo berangka tahun 1940-1941 dari Dinas Topografi dan beberapa foto mengenai pemandangan alam teluk Gorontalo yang cantik dari koleksi KIT.

*Arsip mengenai Politik dan Pemerintahan* tergambar dalam arsip beberapa arsip masa VOC, Hindia Belanda dan setelah Proklamasi Kemerdekaan, termasuk foto-foto berkaitan dengan dilantiknya Gubernur Gorontalo setelah masa reformasi.

*Arsip Perdagangan* tidak dapat ditemukan banyak walaupun aktivitas perdagangan di Gorontalo merupakan salah satu pusat perdagangan di Wilayah Timur Indonesia pada masa VOC, dan Hindia Belanda.

Komoditi Jagung, padi dan cengkeh merupakan hasil unggulan dari Gorontalo dapat terekam dalam arsip *Pertanian dan Perkebunan*.

Sejak jaman VOC Gorontalo menjadi salah satu pusat pertambangan emas walaupun dalam jumlah yang tidak sebesar daerah lainnya, terekam dalam arsip *Pertambangan*

*Arsip mengenai Perhubungan* digambarkan dengan beberapa foto yang memperlihatkan beberapa kapal laut untuk penumpang dan barang di antara Kapal Phinisi yang sedang sandar di Pelabuhan Gorontalo.

Hal lain yang menarik adalah arsip-arsip mengenai Keagamaan dan Kebudayaan. Dua bagian arsip penting ini ditempatkan di bagian akhir dari khazanah arsip Gorontalo ini. Salah satunya adalah peluncuran Al Quran dengan terjemahan bahasa Gorontalo.

Sedangkan arsip mengenai kebudayaan ditampilkan beberapa foto mengenai kegiatan kebudayaan khas Gorontalo.

## DAFTAR PUSTAKA

### ARSIP

Regeering Almanak, 1911 Regeering Almanak, 1939

### BUKU

Juwono, Harto dan Yosephine Hutagalung. 2005. *Limo Pohalaa: Sejarah Kerajaan Gorontalo*. Yogyakarta: Ombak.

### SURAT KABAR

Republika, 17 Februari 2001

Republika, 30 Maret 2001

Kompas, 25 Januari 2000

Kompas, 23 Februari 2001

Kompas, 9 Januari 2009.

Tempo, 6 September 2000

# CITRA GORONTALO DALAM ARSIP



# GEOGRAFI



Pemandangan di sekitar Pantai laut di Teluk Gorontalo  
dengan tanggul penahan ombak,  
1930

Sumber: ANRI, KIT 946/23



Pantai laut dekat pegunungan di Gorontalo,  
1930

Sumber: ANRI, KIT 968/33



Aliran sungai di dataran rendah Gorontalo, 1931

Sumber: ANRI, KIT 249/68



Aliran sungai di bawah kaki pegunungan di Gorontalo,  
1931

Sumber: ANRI, KIT 249/70

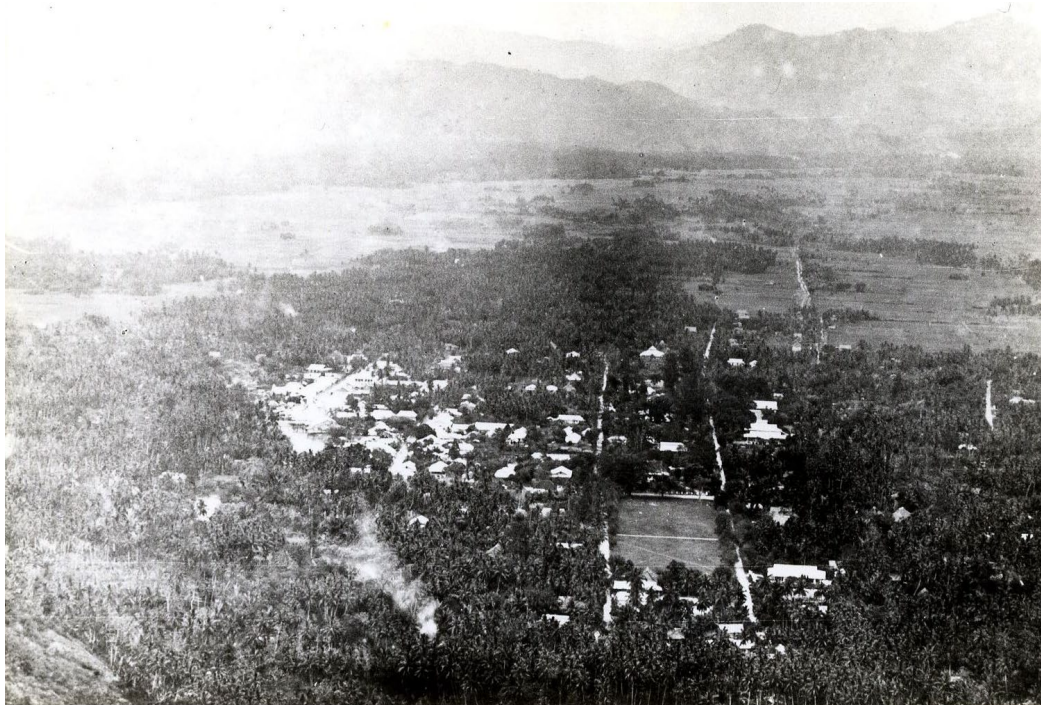
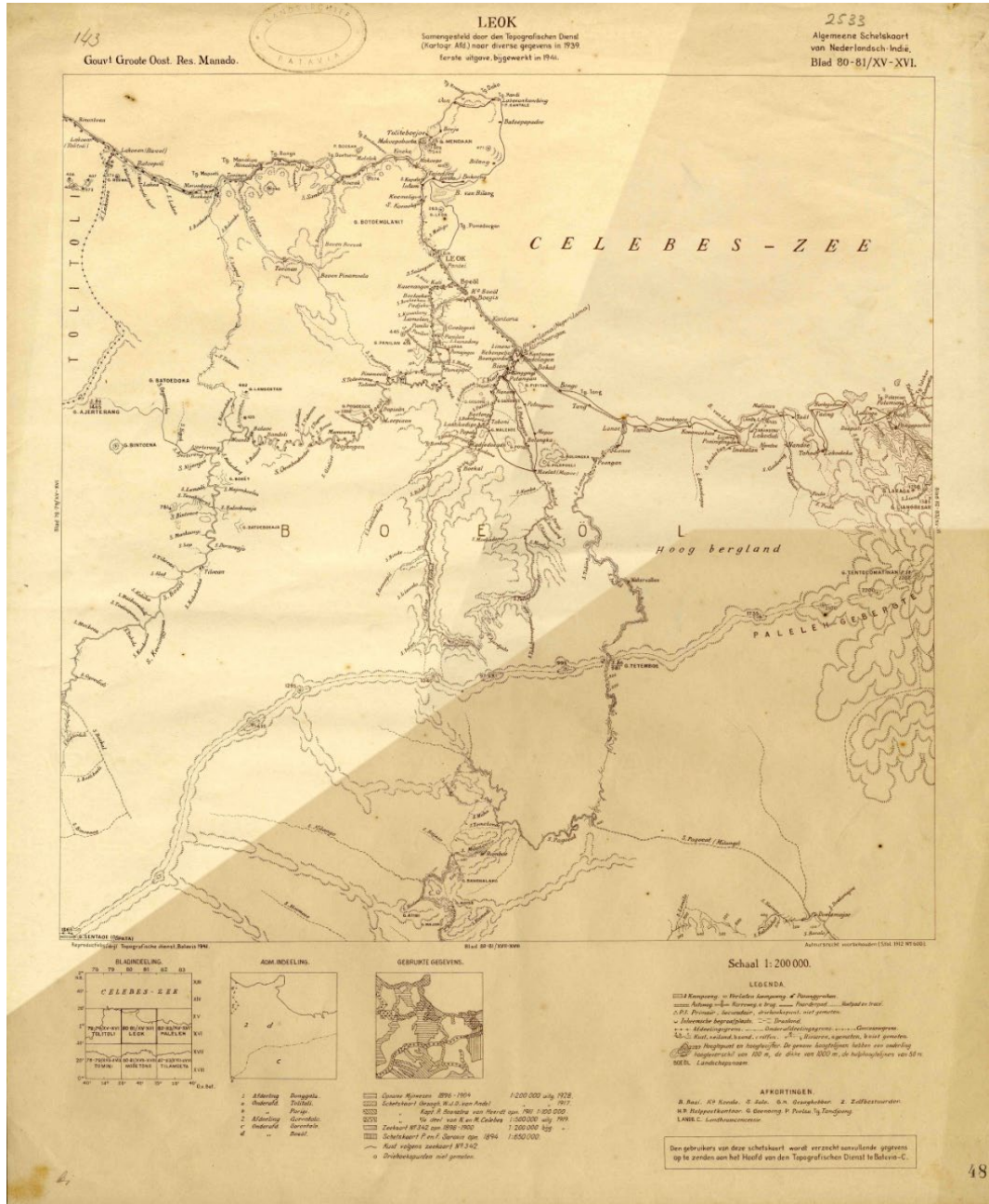


Foto udara sebagian daerah Gorontalo,  
1930

Sumber: ANRI, KIT 56/19



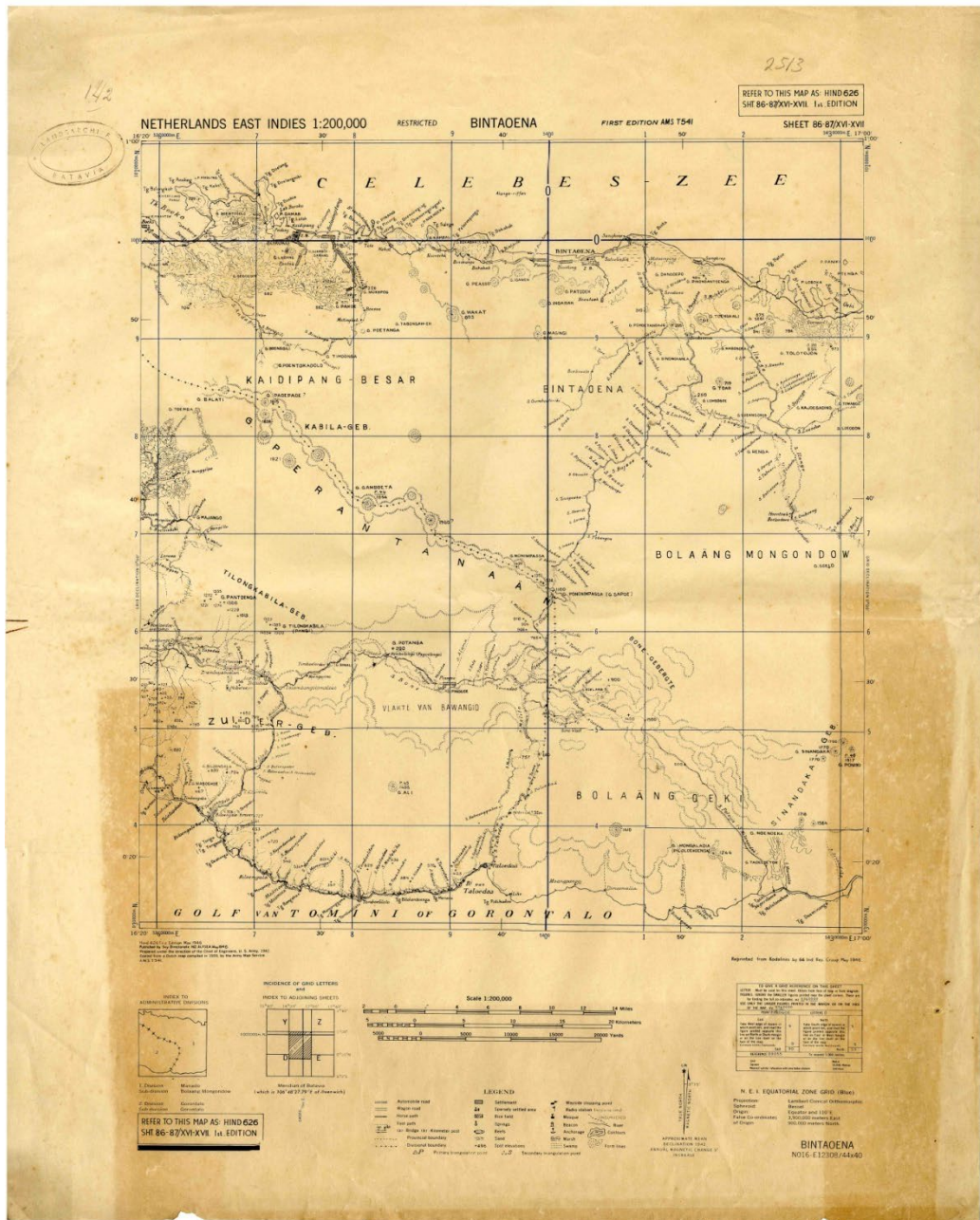


Peta wilayah Leok, Manado,  
1941  
Sumber: ANRI, Dinas Topografi 2533



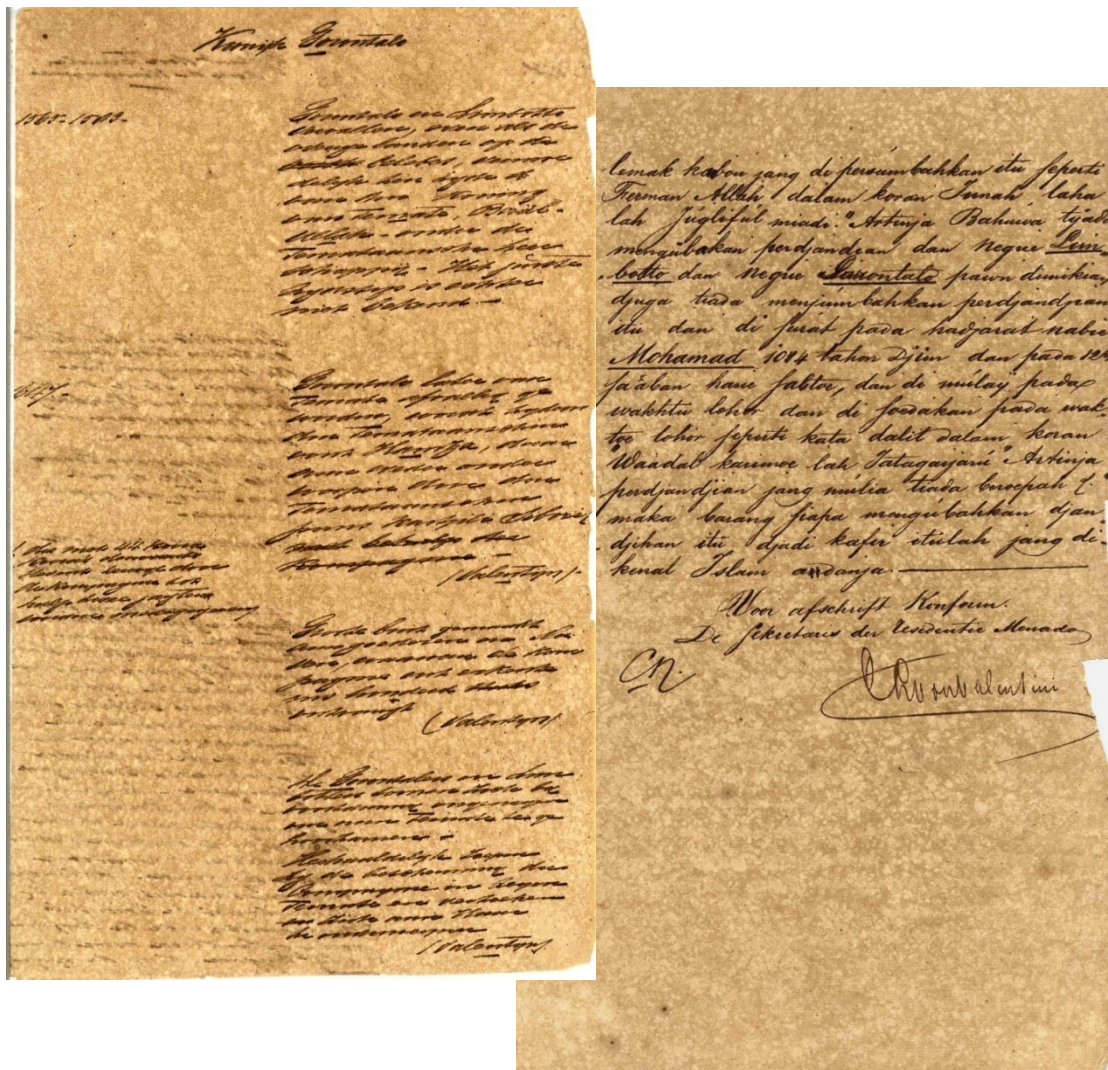


Peta Teluk Tomini, Gorontalo,  
 1941  
 Sumber: ANRI, Dinas Topografi 2530



Peta Batas Manado-Gorontalo,  
1946  
Sumber: ANRI, Dinas Topografi 2513

# POLITIK dan PEMERINTAHAN

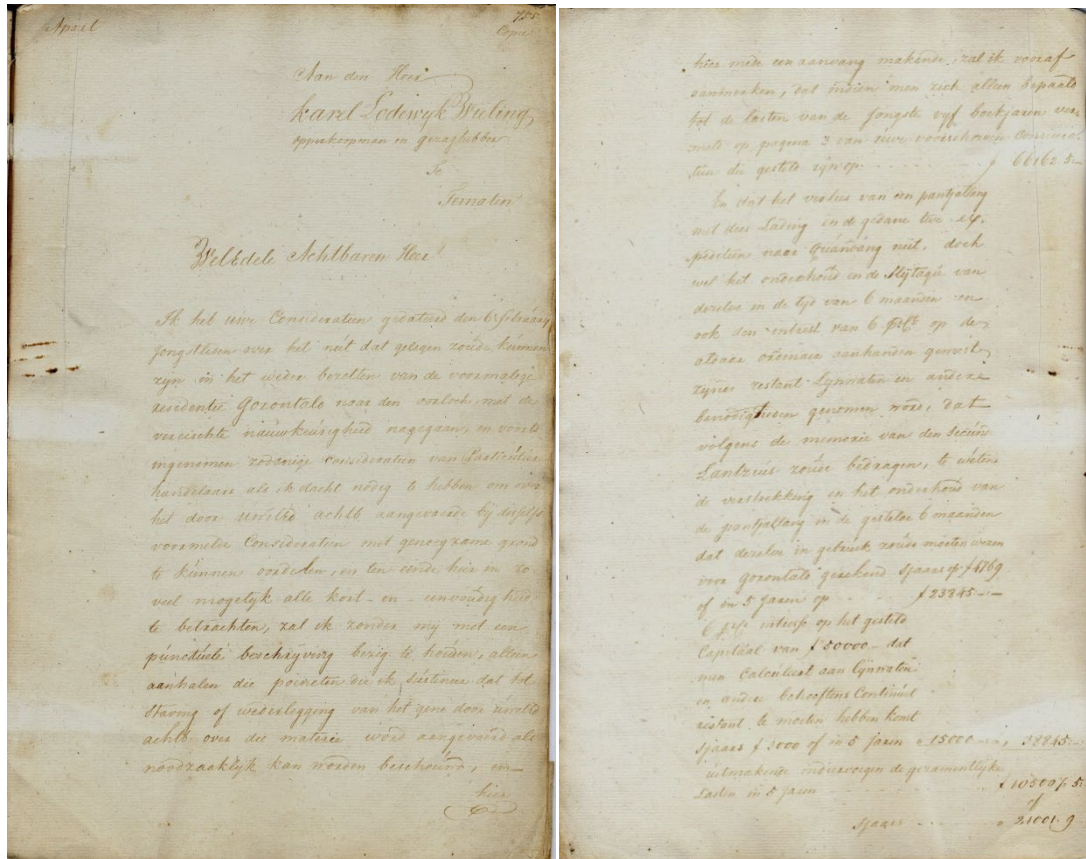


Bagian awal dan akhir dari Kroniek Gorontalo Tahun 1565-1681 yang ditulis oleh Sekretaris Residen Manado menjelaskan tentang politik yang terjadi di Gorontalo antara tahun 1565 s.d. 1681, 1681

Sumber: ANRI, Gorontalo 18/4

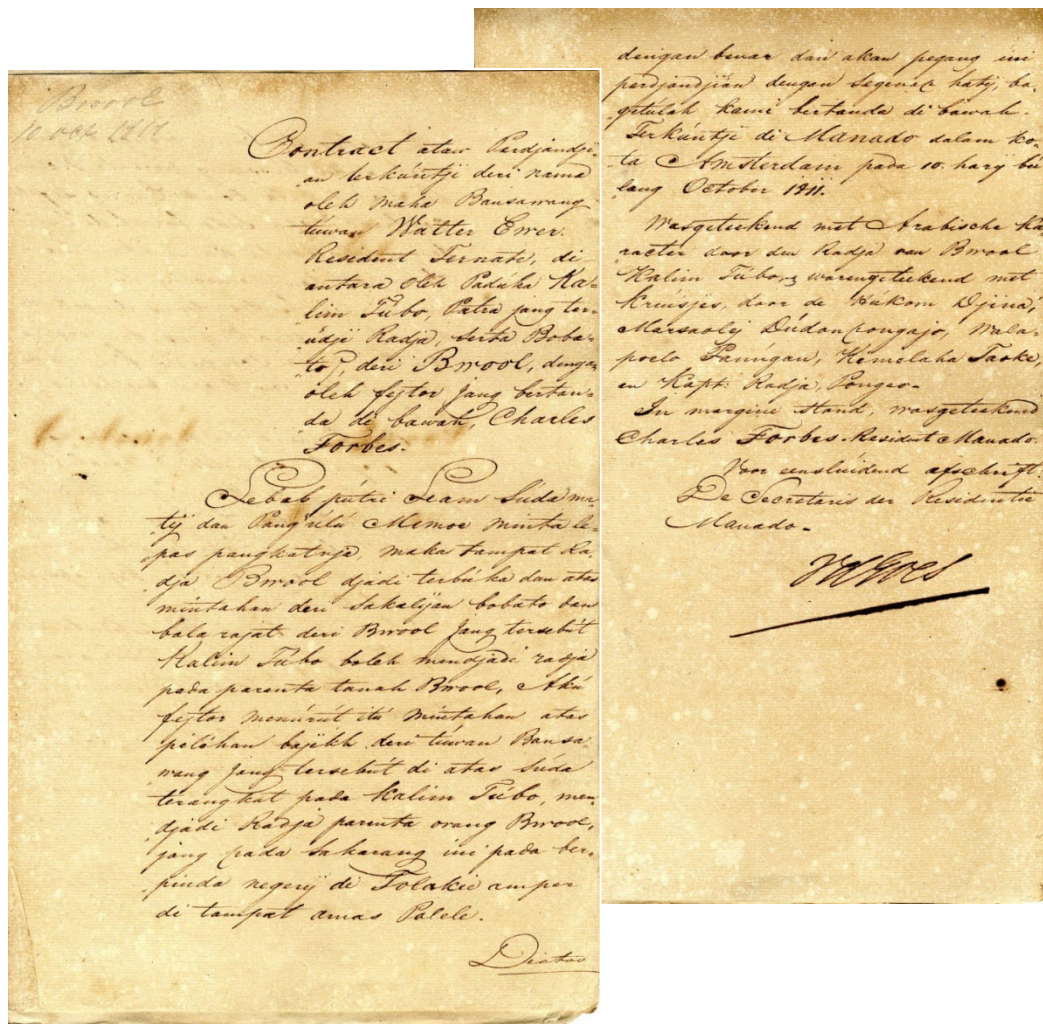
Afscript Behoort by de bylage des  
No. a.  
 Wabehi nastan bilahi Alah ini Hekajah  
 Soerat perdjandjian dan perbataan dan  
 persumbakan negrie Gorontalo, dan negrie  
Limboto bersumpah makan lemak karbau  
 negrie Gorontalo dan negrie Limboto, dan  
 dikalio negrie Limboto anija atau bekim  
 tjilaka kapada negrie Gorontalo maka  
 di lihatnja negrie Gorontalo itu jiwah  
 kitjal atau tinggal lagi sabiwa rumah,  
 atau diwa buwa, atau jafuwo orang, atau  
 douwa jwelo orang, maka tiada lagi di  
 krija kabiasaan negrienna dan kapada  
 karajaan negrienna, dan katungianja  
 dan kadat negrienna, dan herikun negri  
 nja, dan betjaranja, atau di japatnja  
 oleh negrie Limboto negrie Gorontalo,  
 maka dikalo ada jang dimikian itu  
 kapada negrie Limboto toeloeh, tantak  
 sundjandji seperti laut dan Hoe dan  
 kaper dan hantjer seperti lemak karbau  
 jang di bersumbakan itu, maka djika  
 to tiada perbocwatan negrie atau kahen  
 dakh negrie, maka kahendak, Rodya sen  
 dri atau kahendak, Djogregoe, atau ka  
 hendak Marsaoli, atau kahendak anak  
 Raja & atau kahendak orang besaar &  
 maka hendak atau perbocwatanja jang  
 dimikian itu pawa toeloeh bebatak seperti  
 lemak karbau jang di bersumbakan  
 itu dan sapetkmae lagi perdjandjian  
negrie

Bagian awal dari Perjanjian Ikatan Persahabatan Antara Negeri  
 Gorontalo dan Negeri Limboto, 12 Sya'ban 1084 H  
 Sumber: ANRI, Gorontalo 18/4



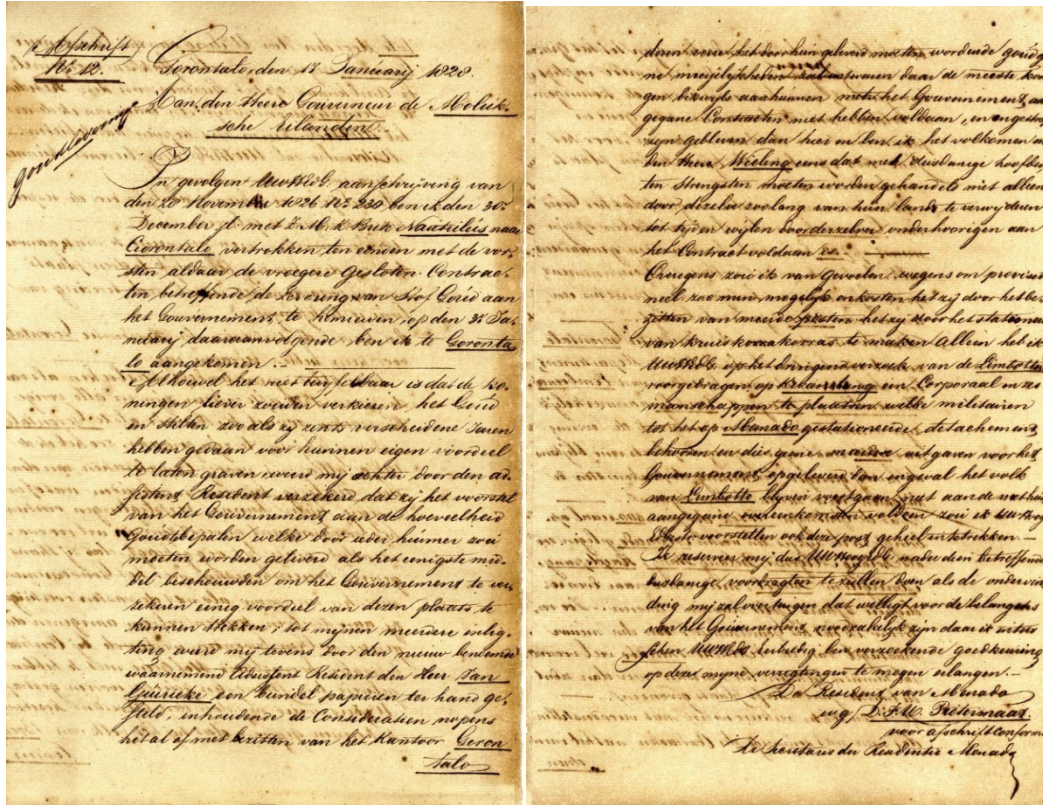
Bagian awal dari Pertimbangan Gubernur Ambon W.S. Gianssen mengenai kedudukan Residenti Gorontalo, 25 Mei 1806.

Sumber: ANRI, Manado 66z



Salinan Perjanjian/Kontrak antara Residen Ternate dengan paduka Kalim Tuba Putra Raja serta Boboto dari Bwool mengenai permintaan rakyat dari Bwool untuk mengangkat Kaum Tumba menjadi Raja Bwool, 10 Oktober 1811.

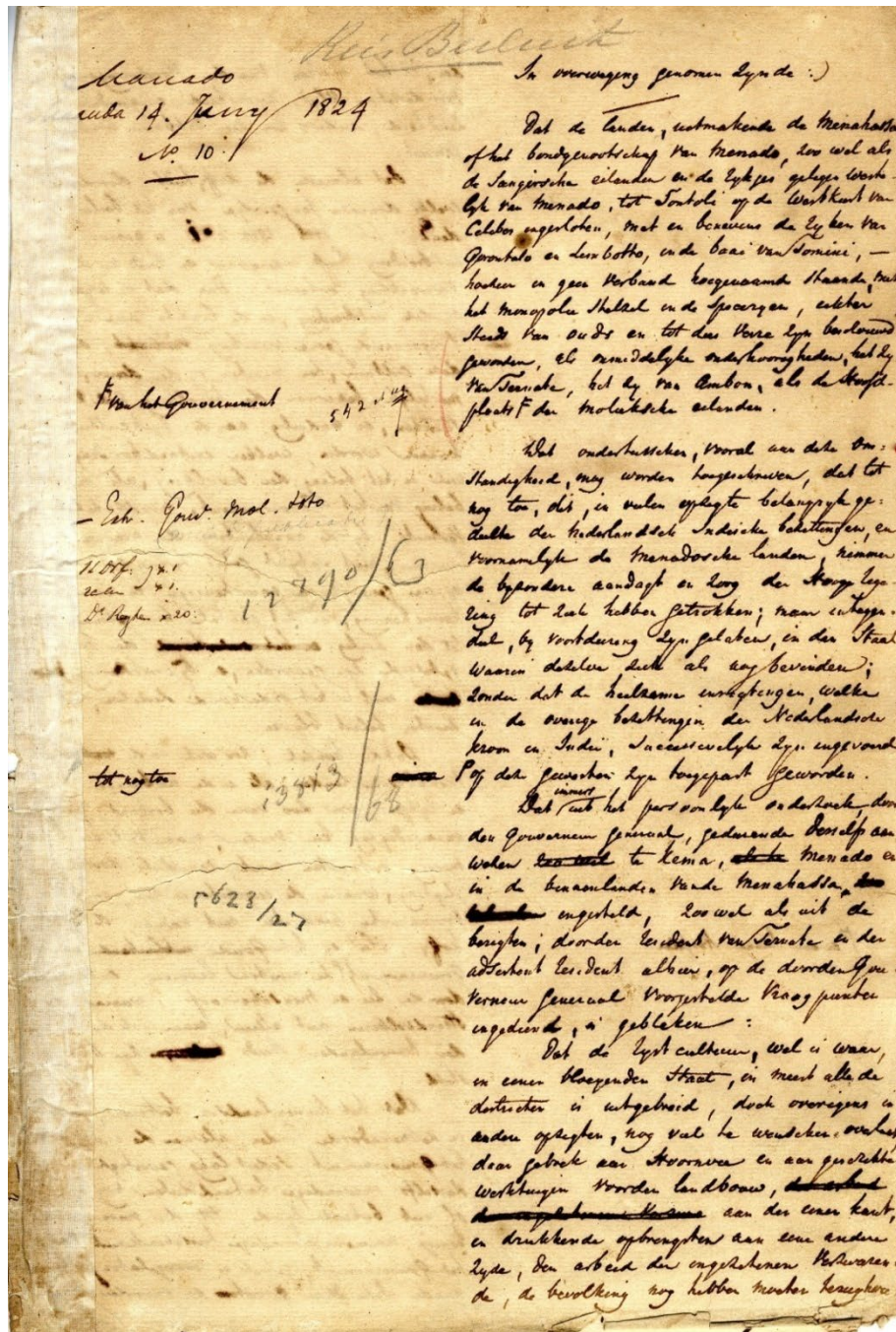
Sumber: ANRI, Manado 66



Surat Residen Manado Pietermaat kepada Gubernur Maluku  
P. Merkus tentang peraturan pusaka Gorontalo dan  
penunjukan Raja Limboto,  
17 Januari 1828.

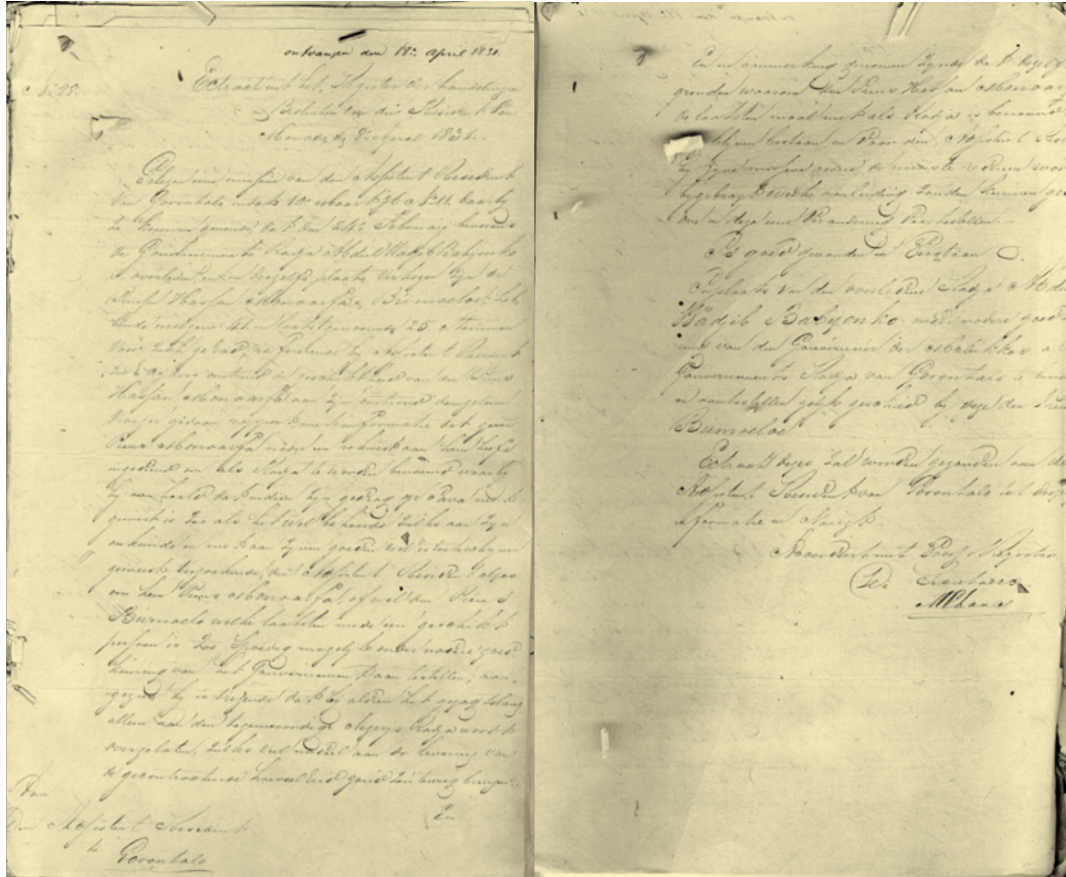
Sumber: ANRI, Manado 18/1





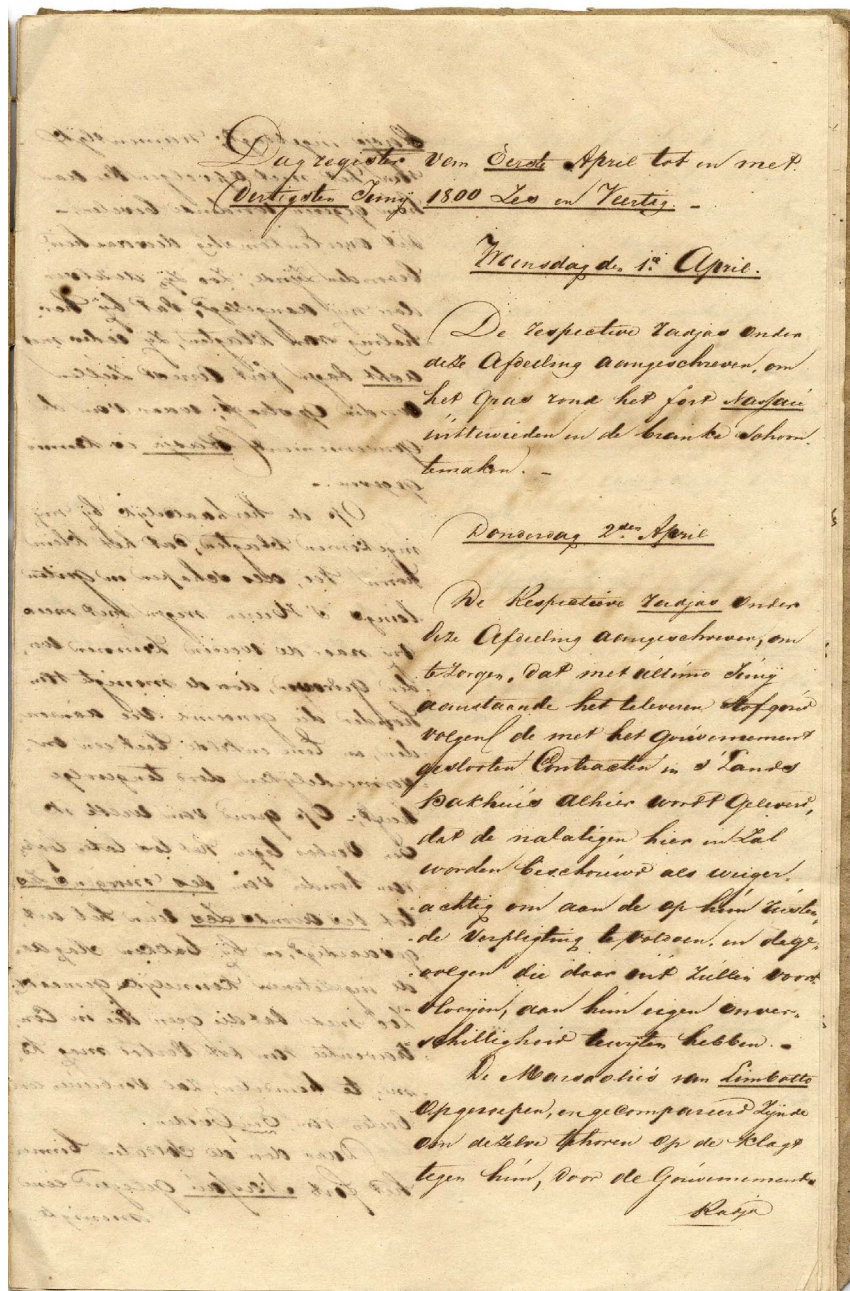
Bagian awal konsep Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Alexander Gerard tentang penetapan pemisahan wilayah Gorontalo dan Limboto dari Karesidenan Ternate menjadi wilayah Karesidenan Manado, 14 Juni 1824.

Sumber: ANRI, Besluit 14 Juni 1824 No. 10



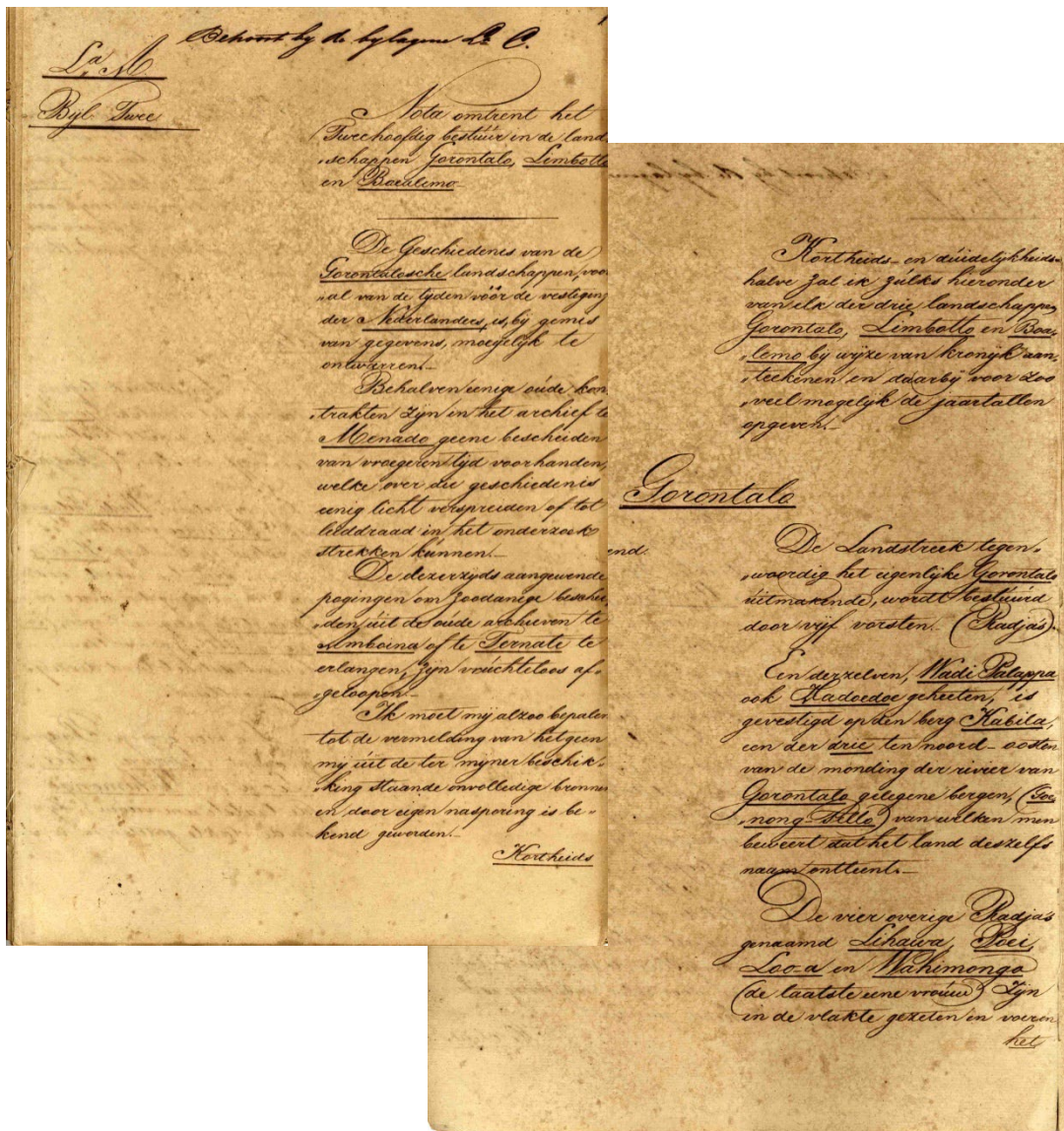
Sebagian isi Besluit Residen Manado, Muldermaas, mengenai  
 pengganti Raja Gorontalo, Abdul Nadjib Bakijanko  
 yang telah wafat,  
 8 April 1831.

Sumber: ANRI, Gorontalo 2/1



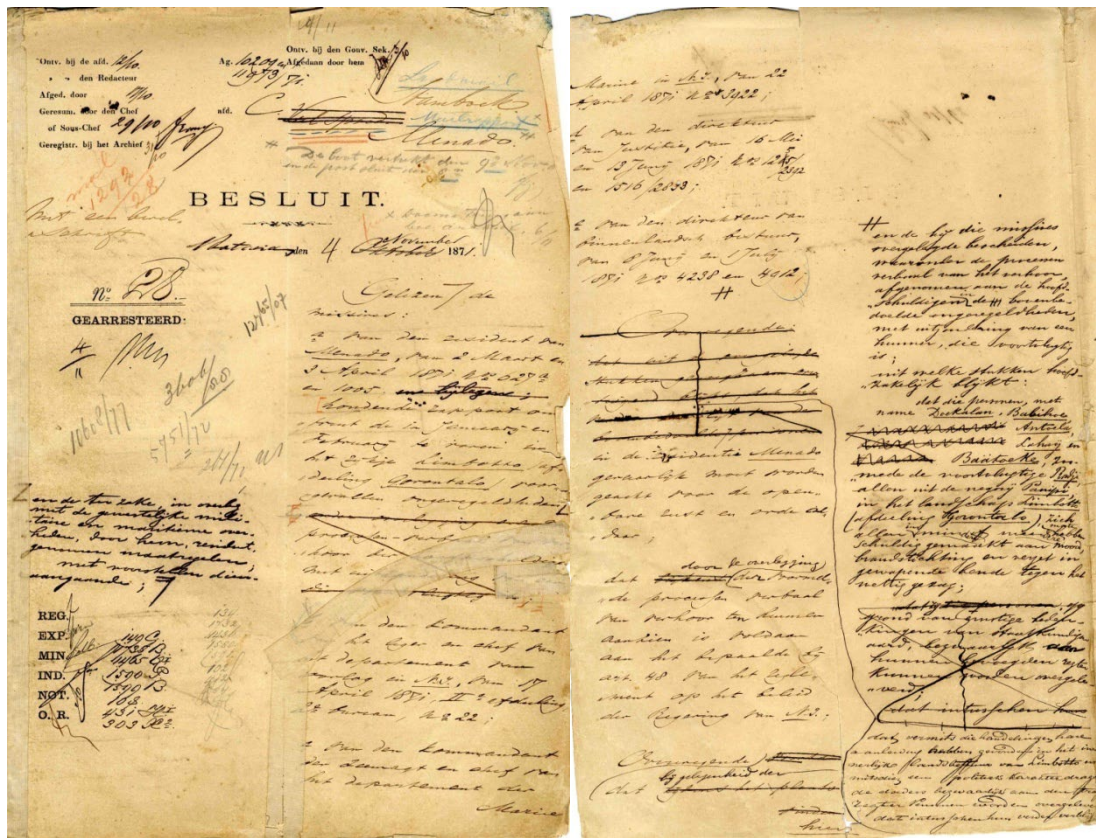
Catatan Harian Penguasa Sipil Gorontalo (F. Masselink) 1840  
30 Juni 1846

Sumber: ANRI, Gorontalo 3/8



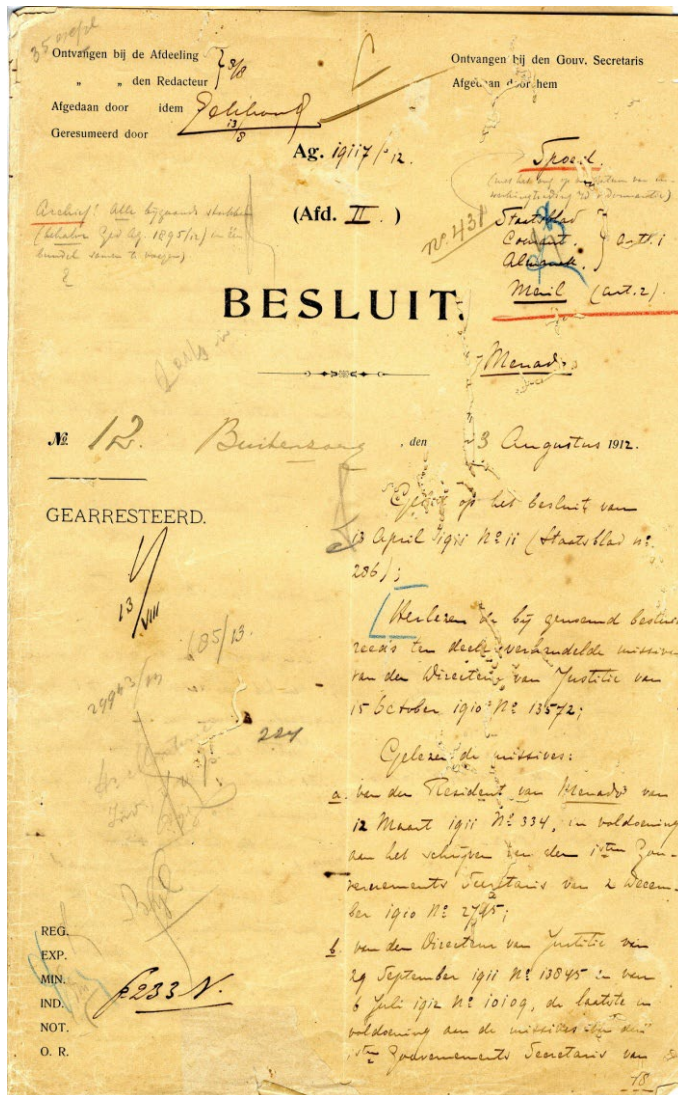
Bagian awal Nota Residen Manado, E.D.L Moreaux tentang Pemerintahan di Gorontalo, Limboto dan Boalemo, antara lain mengenai Raja-Raja yang berkuasa di ketiga negeri tersebut, 1853.

Sumber: ANRI, Gorontalo 18/4



Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Pieter Mijer Nomor 28 tentang vonis hukuman pengadilan terhadap orang-orang yang memberontak di Gorontalo, 4 November 1871

Sumber: ANRI, Besluit 4 November 1871 No.28



rechtswaer in dat gewest in over-  
 eenstemming te brengen met de bij  
 het besluit van 13 April 1911 n:o 11  
 (Haatsblad n:o 286) gewyzigde ad-  
 ministratieve indeling.

In de laatste strekking ontwerp-  
 ordonnantie is mede opgenomen een  
 wijziging van artikel 19 van het regl-  
 ment, ten einde de gelegenheid te  
 openen om den landraad te Gorontalo  
 te met eenige met Landraads gelijky-  
 veldde leden aan te vullen (na  
 hervatting ook de rest onder de byla-  
 gen beëindigend missive van vankeg-  
 wende Departementchef van 29  
 September 1911 n:o 13045). Dit kan  
 wijziging is deens, overeenkomstig  
 het in twee depêches van 2 April  
 j. n:o 161811 geopperd denkbeeld,  
 de rest van Nederlandsch ambtman-  
 schap van de landraadsleden inge-  
 lascht.

Polykous zijn afzets van 5 deen n:o  
 II kan de Raad van Nederlandsch-  
 Loto met de voorgestelde ontwerp ord-  
 nantie, zoodat deze ter algemeene  
 Secretarie op andere punten van  
 ondergeschikt belang is gewyzigd, met  
 vereenigen, behoudens het en een  
 Raad gemaken allegyris tenen  
 bestaan om ook de artikelen 205/par  
 52 en 265 (ante lid) van het reglament  
 in kwestie met de wettige administra-  
 tieve indeling van het gewest in  
 overeenstemming te brengen. In af-  
 wijking van de meening van Mr. Rees-  
 malle acht het Hooge College ont-  
 de

**Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda  
 Nomor 11 tentang pembagian Afdeeling Gorontalo di bawah  
 Asisten Residen dengan ibukota Gorontalo dan dibagi menjadi 4  
 onder-Afdeelingen yaitu: Gorontalo, Boalemo, Kwandang, dan  
 Bwool dengan masing-masing  
 distrik dan ibukotanya,  
 13 April 1911.**

**Sumber: ANRI, Besluit 13 April 1911 No. 11**

2.

der Regeering om voor de vervulling der betrekking van Inlandsch bestuursambtenaar de beschikking te krijgen over jongelieden uit die kringen der Inlandsche maatschappij en van dusdanige ontwikkeling, als daartoe wordt vereischt.

Dezelfde argumenten gelden ook voor dit onderdeel van het gewest Menado. Daarbij komt nog, dat waar de positie van de districts- en onderdistrictshoofden en districtsschrijvers in de afdeling Menado van hetzelfde gewest verbeterd zal worden overeenkomstig die van hunne ranggenooten op Java, het achterwege blijven van ietsverbetering der Inlandsche bestuursambtenaren in de afdeling Gorontalo eene wanverhouding zal scheppen tusschen eenzelfde categorie Inlandsche ambtenaren in eenzelfde gewest, hetgeen niet beverderlijk zal zijn voor den goeden gang van zaken aldaar.

LAOH

SOSELISA

WAWOROENTOE.

Verslag 1<sup>e</sup> nota van wijzigingen (gedr.

st. 1 - 14, blz. 3/4).

Amendement betreffende positieverbetering van districtshoofden enz. in Gorontalo (B I, 12).

Naar aanleiding van het amendement strekkende tot verbetering van de inkomsten der districts- en onderdistrictshoofden in Gorontalo, werd opgemerkt dat de positieverbetering van de districtshoofden in de Minahasa gepaard is gegaan met een reorganisatie van het districtsbestuur aldaar en een vermindering van het aantal districtsambtenaren.

## Laporan Kemajuan Distrik Gorontalo 1918

Sumber: ANRI, BB 1124



Presiden Indonesia Timur, Tjokorde Gde Raka Soekawati  
disambut penduduk setempat saat berkunjung ke Desa Talaga  
sebuah desa kecil di dataran tinggi Gorontalo,  
1948.

Sumber: ANRI, RVD 1833





Ribuan penduduk datang untuk mendengarkan pidato Presiden Indonesia Timur Tjokorde Gde Raka Soekawati di Gorontalo, 1948.

Sumber: ANRI, RVD 1844

2603/10/1949 Ret/Ulu  
4/1-50

Salinan.

Djakarta, 9 November 1949.-

483

Sumbangan dari Gorontalo

satu

Kepada Jth.  
P.T.Sekretaris Djendral  
Kementerian Perburuhan  
dan Sosial

JOGJAKARTA.-

Membalas surat Paduka Tuan tgl.26 Oktober j.l. no.1182/K.U.2/3, kami memberitahukan, bahwa sumbangan2 dari Panitia Pusat Perajaan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Gorontalo (Ketua Dr. MM.Dunda) telah diterima oleh Sekretariat Delegasi di Djakarta dan telah diteruskan sebagai ditunjukkan dibawah ini:

1. Sumbangan f. 35.000,- Uang ini telah kami setor di Bank Negara Indonesia Djakarta.
2. Sumbangan barang2. - Barang2 ini (rupa2 [?]) terbungkus dalam 1 pak dengan merk KDRI, ukuran 56x48x31 cm, telah diteruskan ke Jogjakarta kepada alamat Sekretaris Negara Jogjakarta.

Menurut keterangan jang kami terima, baal ini telah diterima dengan baik oleh KUBRI Jogjakarta pada tgl. 26 Oktober '49 (Th.Harsoadi); lihat surat pengantar KUBRI Jogja tgl.27-10-'49 no.114/D/49.

Sebelumja surat Paduka Tuan tersebut diatas kami terima, kami tidak mengetahui bahwa sumbangan ini dimaksudkan untuk Kementerian Paduka Tuan. Kami harap dengan keterangan ini Paduka Tuan dapat mengurus hal ini sebagaimana mestinja.-

**TELEGRAM**

Dienstgegevens, Plaats v. afzending, Nummer, Woordental, Datum, Tijd, Dienstaanwijzingen

130 gorontalo 41 39/37 3 1115

1949 1 5/6

(Mr.Masrin)  
Sekretaris.

ketua delegatie republik indonesia  
pegangsaan timur 56 batavia

memenuhi kawat no 599/kk/3 dari menteri social republik djokja  
maka ini hari terkirim avb f 35000 jani sumbangan rakyat gorontalo  
untuk republik

ketua perajaan hpki dr m m dunda +

arta,  
.3/11-49 no.2054/Sek/Uu.  
ta.  
ta.  
-

Salinan jang sama bunjinja,  
Jang mengambil salinan:  
  
Loewilestari.

gorentalo 41 39/37 ketua delegatie republik indonesia pegangsaan timur  
56 bt # no 599/kk/3 f 35.000 hh f 35.000 ketua perajaan hpki dr m m dunda

Ontvangen te Bataviacentrum (Radiobedrijfscentrale) Overgesleind naar ..... onder nr.....  
..... 19..... ten ..... Javattijd. .... 19..... ten ..... Javattijd.  
door ..... door .....

S. 1948-328-1000.000 Koffi A 3339

Telegram Ketua Perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI  
Gorontalo kepada Ketua Delegasi RI tentang sumbangan  
rakyat Gorontalo untuk Republik Indonesia  
sebesar f.35.000,  
5 September dan 9 November 1949.

Sumber: ANRI, Delegasi Indonesia 817 dan 1158



Gubernur Sulawesi, Sudiro dalam kunjungan kerjanya di  
Gorontalo disambut barisan kehormatan  
29 Oktober 1951

Sumber: ANRI, Kempen m 6243



Gubernur Sulawesi, Sudiro dengan rombongan mengunjungi daerah transmigrasi di Panguyaman, Gorontalo, 29 Oktober 1951.

Sumber: ANRI, Kempen m 6250



Rakyat Gorontalo menanti kedatangan rombongan  
Presiden Soekarno di Pantai Gorontalo,  
20 November 1951.

Sumber: ANRI, Kempen 511120 TT 1-11



Presiden Soekarno disambut meriah oleh rakyat Gorontalo  
ketika tiba di Pantai Gorontalo,  
20 November 1951.

Sumber: ANRI, Kempen 511120 TT 1-8



Malam resepsi kunjungan Presiden Soekarno  
di rumah Kepala Daerah Gorontalo,  
20 November 1951.

Sumber: ANRI, Kempo 511120 TT 1-4



Sekretaris Jenderal Kementerian Penerangan Roeslan Abdulgani memberikan sambutan pada Rapat Umum yang dihadiri Presiden Soekarno di Gedung Bioskop Gorontalo, 20 November 1951.

Sumber: ANRI, Kempen 511120 TT 1-5





Presiden Soekarno sedang berpidato pada Rapat Umum  
di Gedung Bioskop Gorontalo,  
20 November 1951.

Sumber: ANRI, Kempen 511120 TT 1-7



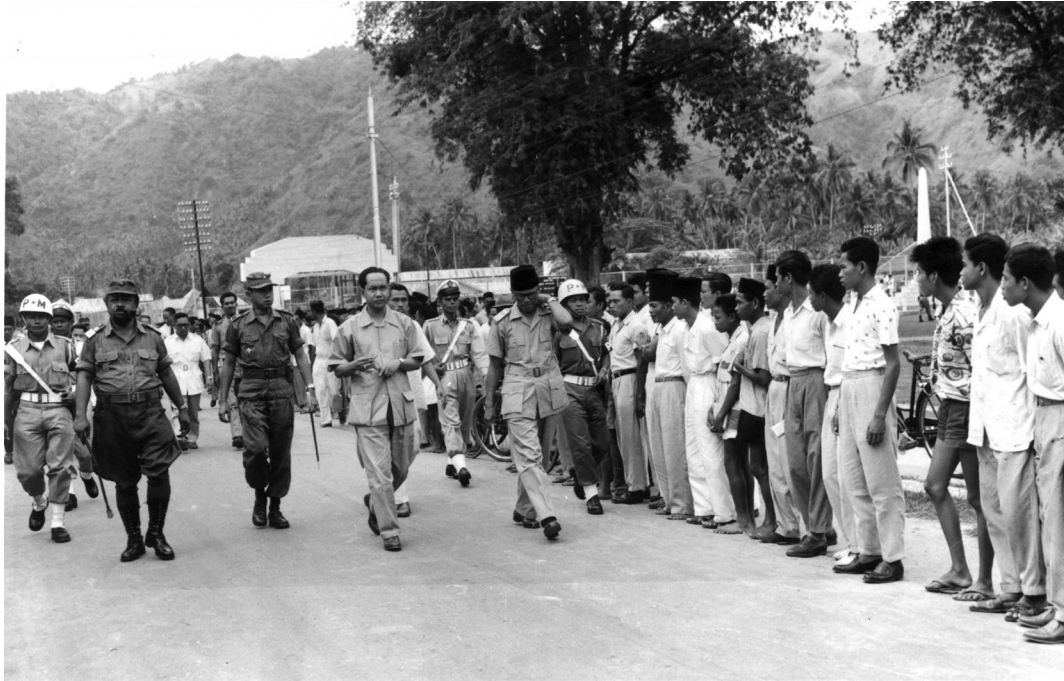
Gubernur Sulawesi, Sudiro bersalaman dengan pemuka-pemuka masyarakat Leok, Gorontalo, 19 Juni 1953.

Sumber: ANRI, Kempen m 8631



Penyambutan Wakil Perdana Menteri I Mr. Hardi oleh masyarakat Tapa, Gorontalo, Tampak hadir Nani Wartabone, Residen Koordinator Sulawesi Utara–Tengah, 12 Oktober 1958.

Sumber: ANRI, Kempen 581012 TT 3



Wakil Perdana Menteri I Mr. Hardi didampingi Jenderal Gatot Soebroto dan Residen Koordinator Sulawesi Utara-Tengah, Nani Wartabone menuju rapat dinas di Gorontalo, 12 Oktober 1958.

Sumber: ANRI, Kempen 581012 TT 12



Sambutan Residen Koordinator Sulawesi Utara-Tengah  
Nani Wartabone dalam rangka Rapat Dinas di Gorontalo,  
12 Oktober 1958.

Sumber: ANRI, Kempen 581012 TT 61



Wakil Perdana Menteri I Mr. Hardi sedang meninjau  
Jawatan Kehutanan Gorontalo,  
12 Oktober 1958.

Sumber: ANRI, Kempen 581012 TT 63



Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi  
Kolonel Suprayogi meletakkan karangan bunga  
di Taman Makam Pahlawan Gorontalo,  
12 Oktober 1958.

Sumber: ANRI, Kempen 581012 TT 19



Wakil Perdana Menteri I Mr. Hardi berfoto bersama di depan rumah Residen Koordinator Sulawesi Utara Tengah Nani Wartabone sebelum meninggalkan Gorontalo, 12 Oktober 1958.

Sumber: ANRI, Kempen 581012 TT 29



*Gubernur Provinsi Gorontalo Menerima Penghargaan  
Adipura oleh Presiden RI*



Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, menerima Penghargaan  
"Adipura" dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,  
25 April 2004  
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo



Pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, H. Idris Rahim  
oleh Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, di Gorontalo,  
23 Januari 2006

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo



Pelantikan Gubernur Gorontalo, H. Fadel Muhammad dan Wakil Gubernur Gorontalo, H. Gusnar Ismail oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Ma'ruf, di Gorontalo, 28 Januari 2007

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo



Kantor Gubernur Gorontalo,  
12 September 2007  
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo



Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad menyerahkan Bendera Merah Putih kepada Tim Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) pada Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-63,  
17 Agustus 2008

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo

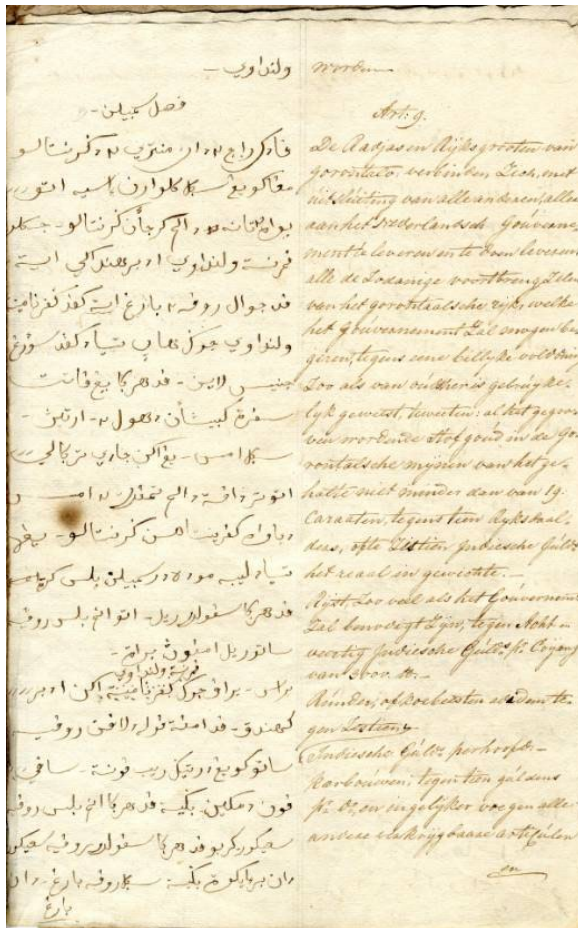
# PERDAGANGAN

The image shows a handwritten ledger with two main columns. The left column contains entries such as 'Sampul & ...', 'Korja', and 'Korja'. The right column contains entries like 'Korja', 'Korja', and 'Korja'. The ledger includes numerical data and handwritten notes in Dutch, detailing the quantities and values of goods imported.

Item Description	Quantity	Value
Sampul & ...	150/	500
Korja	100/	300
Korja	200/	600
Korja	300/	900
Korja	400/	1200
Korja	500/	1500
Korja	600/	1800
Korja	700/	2100
Korja	800/	2400
Korja	900/	2700
Korja	1000/	3000
Korja	1100/	3300
Korja	1200/	3600
Korja	1300/	3900
Korja	1400/	4200
Korja	1500/	4500
Korja	1600/	4800
Korja	1700/	5100
Korja	1800/	5400
Korja	1900/	5700
Korja	2000/	6000

Rekening barang Residensi Gorontalo tahun 1800 antara lain mengenai pemasukan emas dan perak dari Manado dengan kapal Kora-kora.

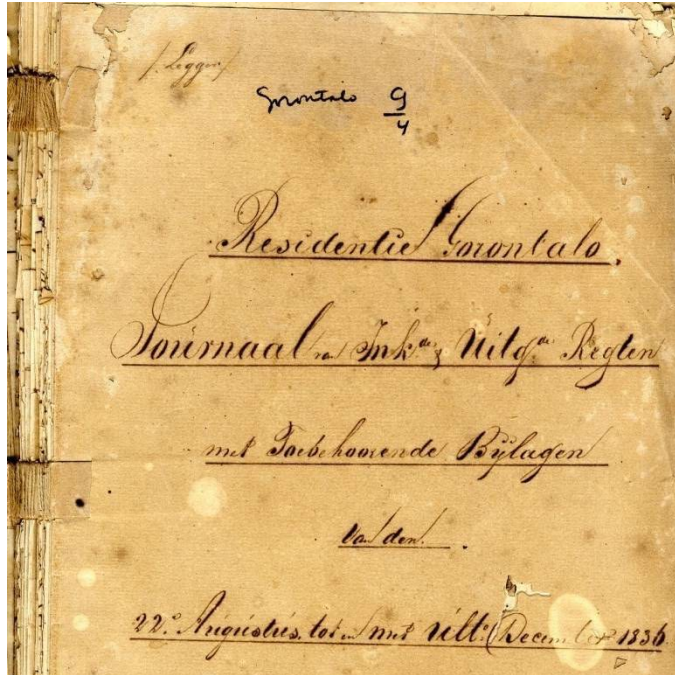
Sumber: ANRI, Gorontalo 14



Kontrak/Surat Perjanjian antara Raja Paduka Muhijuddin Muhammad Jair Iskandar Monoarjo dengan pemerintah Hindia-Belanda mengenai pertambangan emas, produksi kopi, 31 Desember 1819.

Sumber: ANRI, Ternate 131





De Residentie van Gorontalo is te verstaan de Residentie van Gorontalo en de Residentie van Gorontalo

Nummer	Naam der Waaren	Vanwaar afkomstig	Vanwaar afkomstig	Vanwaar afkomstig	Vanwaar afkomstig	Vanwaar afkomstig
1	20 Koppen Santen	18 Sept 1836	Gorontalo	Van Gorontalo		
2	10 Koppen Santen	18 Sept 1836	Gorontalo	Van Gorontalo		
3	10 Koppen Santen	18 Sept 1836	Gorontalo	Van Gorontalo		

Gorontalo d. 18. Sept. 1836

De Residentie van Gorontalo is te verstaan de Residentie van Gorontalo en de Residentie van Gorontalo

Jurnal Residen Gorontalo tahun 1836 antara lain tentang laporan muatan barang kapal yang datang ke Gorontalo.  
18 September 1836  
Sumber: ANRI, Gorontalo 9/4

No. 12

Bij de ontleding van de  
Bekend den dag en het  
nummer aldus.

Geset Bijlagen:  
2

EXTRAKT uit het Register der Besluiten  
van den Gouverneur Generaal van  
Nederlandsch Indië.

Ratara, den 12 November 1857.

Gelet op art. 13 van het algemeen besluit  
van 29 October 1850 N: 8, waarbij de rege-  
rent van Atjeh de 2e klasse, om,  
voor een deel bij welke slagen van een  
mogelijke nader stelsel, acht, in de  
landschappen Bwool en Pantole de  
goudbewerking af te schaffen en met  
de 2e klasse alleen overeenkomstig te  
handelen, ten aanzien van haren staet,  
kindsige volkscultuur, daartoe  
voor een deel mogelijk volgende de re-  
solutie van de 1e klasse van het aan het  
besluit gekocht. Enz. contract:

Enz. ten aanzien van den heer  
van der Malakische Eilanden ten van  
4 September 1857 N: 118, en de daarbij over-  
geleide aan hem gezegte resolutie van den  
Koning van Atjeh van 10 July 1857  
N: 69, ten aanzien van de bescheiden van  
den heer Koning, op den 24 Juny 1857  
met den naam Arasjara en Atjeh.

Aan  
den Gouverneur  
der  
Malakische Eilanden

tenz. ten aanzien van den heer  
Malakische Eilanden, in te  
aanzien, ten aanzien van het bezit  
van bevestiging te worden voor-  
geen en naderhand te worden  
te worden tenz. tenz. tenz.  
Tenz. tenz. tenz. tenz.

1. dat de verplichte levering van  
goud door Bwool van 15 Juny  
1857 afgeheven is.

2. dat het landgemeenschap zich voor-  
behoudt, en nader, en verband  
tot het toezien van Bwool in  
zelve art. 16 der onderverplijde  
overeenkomst, aan het land, voor  
als de meeste landschappen ten  
aanziende van Atjeh jaarlijks te  
aan afbrengen van de betaling van  
15 (vijftien) van elk huisgezin,  
buitenland, inget, of in voortgang  
aan het land, tegen prijs,  
by aflossing te Atjeh van de  
heer, nader, of door de  
met de 2e klasse overeenkomstig te zijn,  
Tenz. tenz. den Koning van Atjeh en  
te zijn, en nader, en nader, en nader,  
neder.

Sebagian isi Perjanjian Raja Bwool dengan Gubernur Maluku  
antara lain mengenai pasokan emas dari Bwool,  
12 Nopember 1857.

Sumber: ANRI, Ambon 1532



Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad menyaksikan pengapalan sapi Gorontalo yang akan diekspor,  
28 Agustus 2007

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo



Pengapalan jagung hasil produksi pertanian Provinsi Gorontalo yang akan diekspor di Pelabuhan Anggrek, Gorontalo, 28 Agustus 2007

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo

# **PERTANIAN dan PERKEBUNAN**

Das Jahr, mit Aufhebung der  
 einige Jahr lang bestehende,  
 man mit der Commune Loos, allhier  
 heeft aangebracht, en het ras te  
 verbeteren, alwaar eenen hier een  
 men enige Oplossing aan  
 heeft bedacht. -

Volgens het alhier en  
 menigte, en goed koop Verrijken,  
 en Namen van der Einige Gemeente  
 met Woort, de weenige Genden en  
 Genden die hier Gemeente worden  
 behoren aan Burger, en worden  
 by den Gemeentelid met hoofde  
 dat de twee Verrijking behoren  
 met gevonden. -

C. Vischering

De waachvangst, in de  
 eenal weinig verbeid en, bested  
 wordt, is in den loop van het  
 Jaar een tegenwoord, en door  
 dat en weinig de Verreer alhier  
 eenwilde, een Gemeent, is de prijs  
 de de Waak-buiten gewone  
 loop Gemeent. -

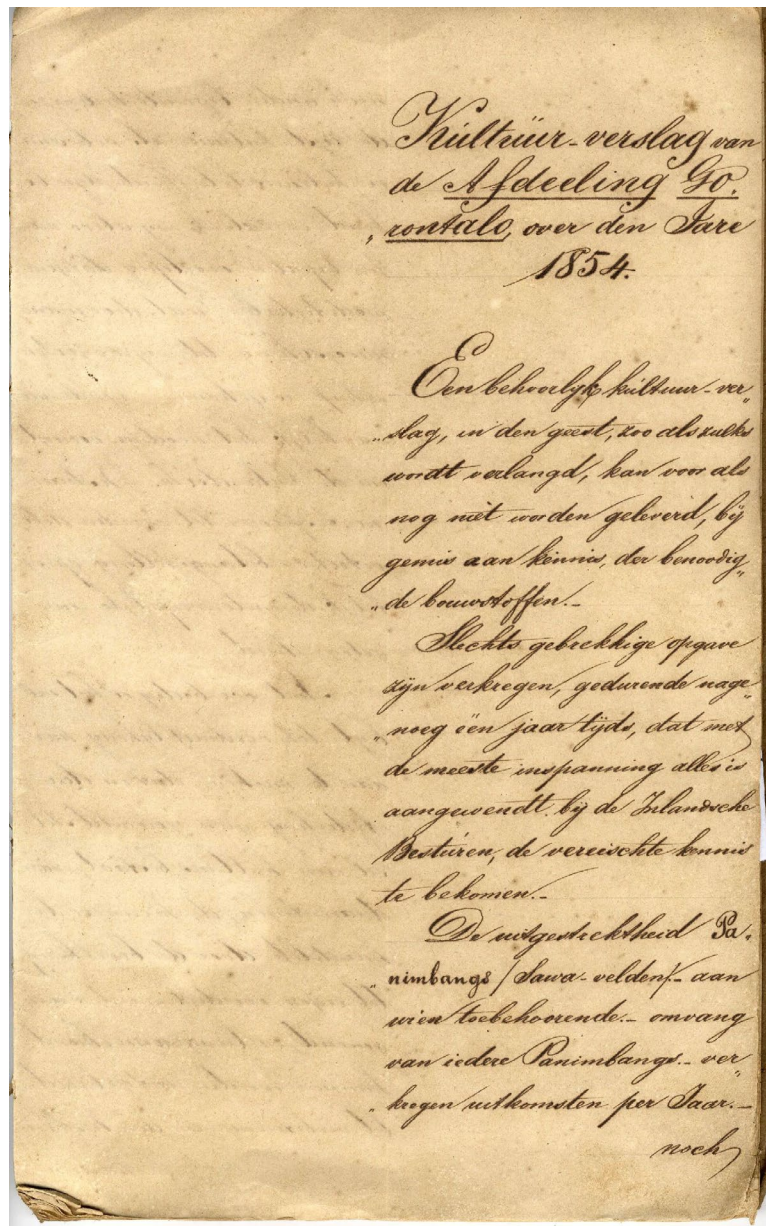
Sindsom de Verrijking  
 selen van het meer en, Linbotta  
 en wat een van deez is, de beste  
 die mij te moech te jenen aan het  
 Verdrag van 1840. -

De

Laporan dari penguasa sipil tentang perikanan  
yang pertumbuhannya meningkat

31 Desember 1845

Sumber: ANRI, Gorontalo 3/2



Bagian awal Laporan Afdeeling Gorontalo tentang perkebunan kopi 1854

Sumber: ANRI, Gorontalo 3/5



Simbol yang ditera di pohon kelapa di Gorontalo sebagai tanda inventarisasi pohon,  
1930

Sumber: ANRI, KIT 311/48





Wakil Perdana Menteri I Mr. Hardi, Nani Wartabone, dan  
Jenderal Gatot Soebroto meninjau Waduk Irigasi di Tapa,  
Gorontalo,  
12 Oktober 1958.

Sumber: ANRI, Kempen 581012 TT 30



Tempat penggergajian kayu olahan hasil perkebunan  
di Gorontalo,  
12 Oktober 1958.

Sumber: ANRI, Kempen 581012 TT 65



Perkebunan tebu di Gorontalo,  
14 September 1965

Sumber: ANRI, Kempen 2b



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Juli 1996

Nomor : B- 481 /Pres/ 7/1996  
Sifat : Segera  
Lampiran : ---  
Perihal : Persetujuan penanaman modal  
asing.

Kepada Yth.  
Sdr. Menteri Negara Penggerak  
Dana Investasi/Ketua BKPM  
di  
Jakarta

Setelah membaca surat Saudara Menteri Nomor: 555/A.1/1996 tanggal 10 Juni 1996 perihal di atas, dengan ini kami menyetujui permohonan penanaman modal asing (100%) dari Maria Pearls Co. Ltd. dan Sdr. Kanjuro Yamashita - Jepang yang akan berusaha di bidang budidaya mutiara, berlokasi di Kabupaten Gorontalo - Sulawesi Utara (harus sesuai dengan RUTR/RDTR daerah setempat) dengan daerah pembudidayaan mutiara di perairan pantai selatan Desa Lemito (Leinito), Kecamatan Popayato, Kabupaten Dati II Gorontalo sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perikanan Nomor: IK-120/D3-2828/96K tanggal 26 April 1996, dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

Selanjutnya Kantor Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/BKPM bersama Departemen Pertanian supaya memberi petunjuk-petunjuk yang diperlukan guna kelancaran usaha tersebut dan mengawasi pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, *Soeharto*

SOEHARTO

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Pertanian;
4. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN;
5. Gubernur Bank Indonesia;
6. Direktur Jenderal Perikanan.

0 888221 M 32

Surat Persetujuan penanaman modal asing budidaya mutiara  
di Kabupaten Gorontalo

10 Juli 1996

Sumber: ANRI, Asmin 5149



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 April 1997

Nomor : B-198/Pres/04/1997  
Sifat : Segera  
Lampiran : --  
Perihal : Persetujuan penanaman modal  
asing.

Kepada Yth.  
Sdr. Menteri Negara Penggerak Dana  
Investasi/Ketua BKPM  
di -  
Jakarta

Setelah membaca surat Saudara Menteri Nomor: 218/A.1/1997 tanggal 19 Maret 1997 perihal di atas, dengan ini kami menyetujui permohonan penanaman modal asing (100%) dari Sdr. Itaru Uchida dan Kurenai Sangyo Co. Ltd. - Jepang yang akan berusaha di bidang industri pembekuan ikan dan pengolahan ikan berlokasi di Kabupaten Gorontalo - Sulawesi Utara (harus sesuai dengan RUTR /RDTR daerah setempat), dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

Selanjutnya Kantor Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/BKPM bersama-sama Departemen Perindustrian dan Perdagangan supaya memberi petunjuk-petunjuk yang diperlukan guna kelancaran usaha tersebut dan mengawasi pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
  
SOEHARTO

Tembusan Yth. ;

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN;
5. Gubernur Bank Indonesia;
6. Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan;

Persetujuan penanaman modal asing bidang pembekuan dan  
pengolahan ikan di Kabupaten Gorontalo

10 April 1997

Sumber: ANRI, Asmin 5699



Penanaman perdana Padi Gilirang oleh Gubernur Gorontalo,  
Fadel Muhammad, sebagai penanaman dimulainya  
penggunaan bibit Padi Gilirang di Gorontalo,  
28 September 2003

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo melakukan tanam perdana padi hibrida di Gorontalo, 15 Januari 2007

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo



Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad melakukan panen perdana Jagung Hibrida di Gorontalo yang merupakan salah satu komoditi pertanian unggulan dari Provinsi Gorontalo, 11 Maret 2007

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo





Kunjungan Kerja Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla ke  
Gorontalo, didampingi Gubernur dan Wakil Gubernur yang  
sedang mengamati hasil panen jagung Hibrida,  
17 Oktober 2007

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo



Panen perdana Cabe Merah Keriting Malita FM di Kebun Percontohan oleh Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, 21 Maret 2009

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo

# **PERTAMBAHAN**

niet te verroch affen, in cas  
 vone sulke niet de alomte  
 voutropene koninkrijken en ma-  
 terialen aen te gaderen oerbude.  
 kelen geschieden ten welken  
 het open spijker en andere al-  
 naar niet voortgedragt worden  
 de bevoegdheid, spijvernunt  
 hie verhoort worden.

Art. 8.  
 De Konink en Koningin  
 van Banca hebben verboden  
 zich om 2 jaartjes aen het  
 Nederlandische Gouvenement  
 te becomen, dat vele beolan-  
 steg pond als telkens om de  
 drie jaren niet gemeen overly  
 dat soorden bepaald voor de  
 drie verthomende jaeren dat  
 deze bevoegdheit maecten de  
 koning twee hondert beolan-  
 steg niet minder dan negen  
 tien Caraten gebalten tegen  
 de tien gouden het beaal.  
 ingewicht, bebaallong en der  
 de gebelken in deuten en  
 derde gebelken in begraden  
 en een derde gedeelte in  
 vierde beleving het gebelken

de onderdanen zich onder  
 bescherming van andere  
 naar verdragen des Konink  
 bevoegd soorden aen te gaderen  
 of een allegaen aen te gaderen  
 de aan hinnen verplijtingen en  
 trekken en langzaam en dan allen  
 ten bevoegdheid van gaderen  
 de Konink van Banca gebelken  
 niet dan het gedeelte van het  
 volk van Banca bevoegdheid  
 maecten om spijker en andere  
 goede aen te gaderen van het  
 Nederlandische Gouvenement.

Alhoes overeen gekomen  
 he sedicht en bevoegdheit in het  
 jaar 1812 in de Gouvenement  
 la op de Negende Januari  
 des jaers achtte hondert  
 achtentwintig.

De Konink van Manado  
 De Gouvenement  
 De Konink van  
 De Gouvenement  
 De Konink van  
 De Gouvenement

Bagian akhir dari Kontrak (Perjanjian) antara Raja Boalemo  
 dengan Residen Manado tentang ijin pertambangan emas  
 di Boalemo, (ps 8),  
 9 Januari 1828.

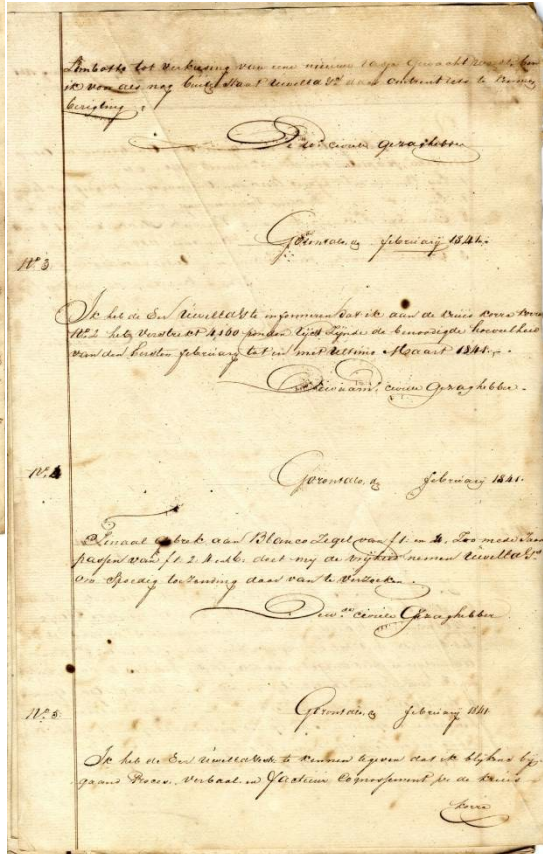
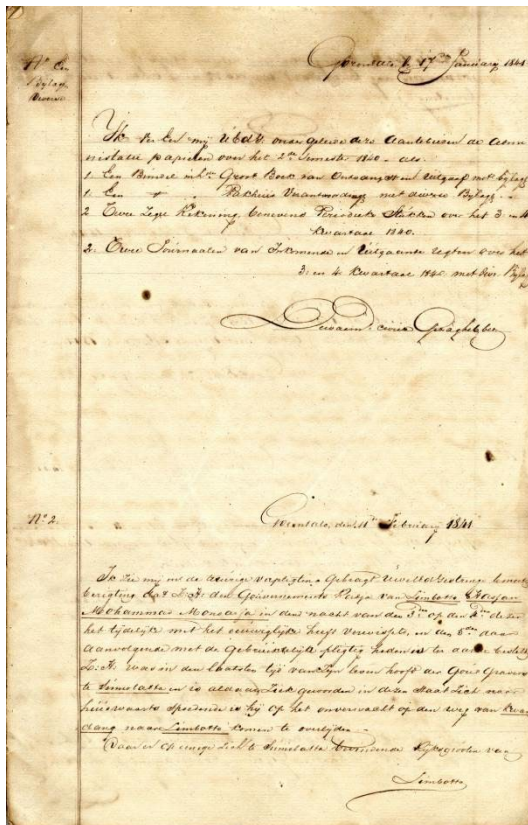
Sumber: ANRI, Kontrak Boalemo (Besluit 9 Januari 1828)

د اموریغ امنت کوئیج برس در ۱۳۰۰ هجری قمری  
در سواد کونین اکر باره کلاان تانان و لایق توله روئیقا  
فصل اول  
اوله اورنج بیج کسلاخ سده ده د پیشک اکن  
سیاد بوله دهن کسکان سدر بره منگیل  
کسکان بر اقلت فرقی د لایق ماس تانان مشرت  
کهن و فن بولایق اولان م تانان لاک درایت  
اورنج م دهن کسکان بیج کسکان سده ده د پیشک  
برایق م دایق سوت م هارس بیور باله فرایق کمالیا  
فصل دوم  
بر اقلت لاک برایت اوله رایق دان لایق لاکل کسکان  
اورنج م لایق در سستان یک مشکل د شانان  
اوله رایق کسکان هاکس اکن بیور بیج دان کسکان  
د سوادور

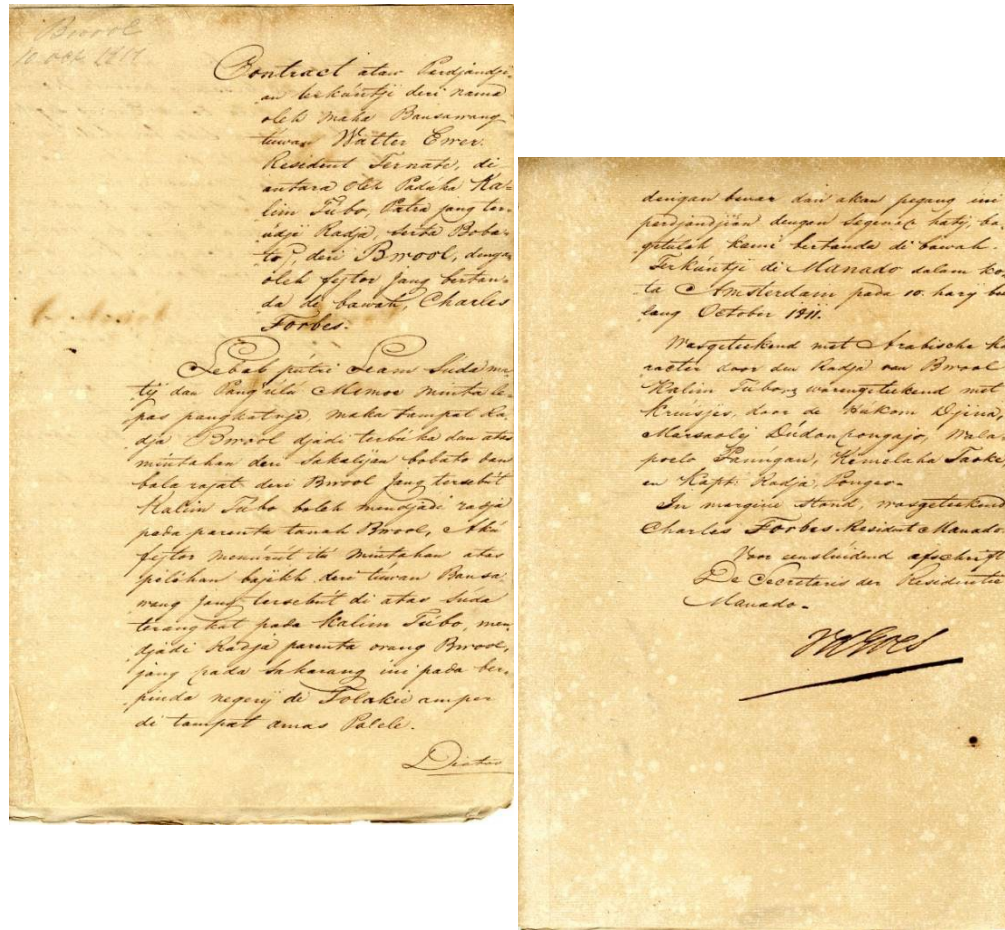
لاین اورنج بوله ند برومه تفکیک د کردونکن  
بقیگی در فرشتا هر بولایق مشکونف و  
بوله دهون در سداقت کسوات کسواته ازین  
در اوله یئور مانادوان سیکتوروش اورنج د لایق اکن  
نیاد بوله تفکیک لام در کسکان اد ترقیلس د مرکب مشورت  
د مکسین سده ترقول بر سته دان د قوتان  
د دام کوست استوزم د سنادو ند جم  
فصل اول  
د مکسین سده ترقول بر سته دان د قوتان  
د دام کوست استوزم د سنادو ند جم  
فصل دوم  
برایت ۱۸۲۹  
Resol. ۲۵ februarij ۱۸۳۰  
۳۲ ۲۵

Bagian akhir Perjanjian (Kontrak) antara Raja Bone Bolango dengan Residen Manado Pietermaat, tentang perjanjian perjalanan dalam rangka pengiriman hasil tambang, 29 Februari 1830.

Sumber: ANRI, Kontrak Bolango (Resolusi 25 Februari 1830 No. 35)



Surat dari Penguasa Sipil kepada Raja Limboto mengenai penggalian emas di Sumolatta, 11 Februari 1841.  
 Sumber: ANRI, Gorontalo 1/6



Kontrak Perjanjian antara Residen Manado, MCE Stakman dengan Raja Bwool tentang izin pertambangan emas, 29 Juni 1891

Sumber: ANRI, Kontrak Bwool (Besluit 29 Juni 1891 No. 19)

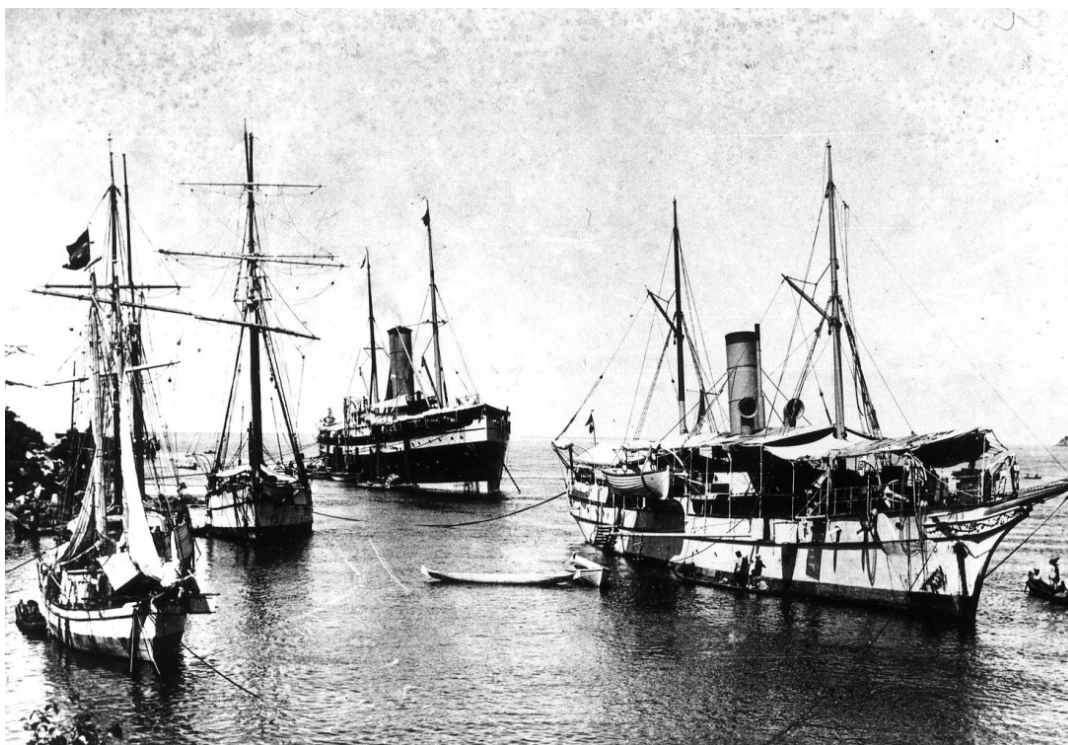
# PERHUBUNGAN





Pelabuhan kapal di Gorontalo,  
1890.

Sumber: ANRI, KIT 215/18



Kapal-kapal Phinisi sebagai salah satu alat transportasi laut untuk penumpang dan barang sedang melepas sauh di Teluk Gorontalo.

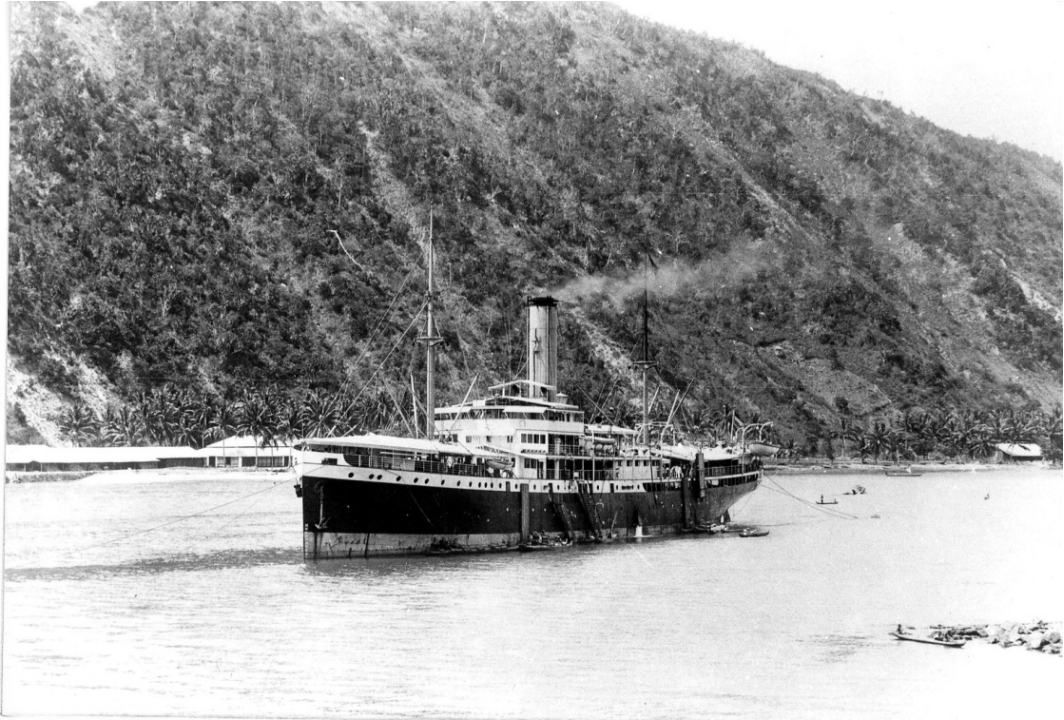
1930

Sumber: ANRI, KIT 56/17



Perairan pintu masuk kapal di Teluk Gorontalo.  
1930

Sumber: ANRI, KIT 56/13



Kapal Penumpang Motor (KPM) *van Imhoff* di Teluk Gorontalo,  
1930

Sumber: ANRI, KIT 265/2

# KEAGAMAAN

N<sup>o</sup> 9. 171-65  
Korontalo, den 4 January 1865.

*Handwritten notes in the top left corner:*  
Korontalo den 4 Januari 1865  
Asisten Resident B van Baak  
Resident Manado

Ik heb de eer Uw Erfgening te  
bejdelijk mededeelen, dat gedurende het  
jaar 1864 alhier geen passagen zijn  
afgegeven aan Mekka gangers, en dat  
ook geen Hadjis van daar alhier  
zijn terug gekeerd.

De Assistent Resident

*[Signature]*

Aan  
Den Haren Resident  
van  
Manado.

Surat dari Asisten Residen Gorontalo, B van Baak kepada Residen Manado melaporkan tidak ada surat jalan yang diberikan kepada calon jamaah haji selama tahun 1864 dan tidak ada jamaah haji yang kembali dari Mekkah.

4 Januari 1865.

Sumber: ANRI, Manado 211

NAHDLATUL 'ULAMA  
TJABANG GORONTALO.-

Gorontalo, 4 Mei 1965,-

*Jm. P. M. U.  
di Gorontalo.*

No. : 22/Tanf./V-'65.-

Kepada

Fokok : Maklumat hasil Rapat 1. Kepala Polisi Ressort Gorontalo  
Munjasa/Pengurus-  
Lamp. : 2 (dua) helai.- 2. Front Nasionalis Part II Gorontalo

AGENDA No. : 12, 5, 2.

DITERIMA TGL. : 12/5/65

DIBALAS TGL. : 17/5/65

Di  
Gorontalo.-

Basilindis, Soehmanir, Soekas.-

Sehubungan dengan surat maklumat kami tgl. 19 April 1965 no. 12/Tanf./VI-'65, maka bereslah ini kami sampaikan 2 helai daftar susunan pengurus lengkap N.U. Cabang Gorontalo bersama Bagian 2, Badan 2 Gerakan/Kelompok, yang dinalika oleh pengurus partai yang diwakili oleh pengurus dari Badan 2 Gerakan dan Keluarga Partai tab. dengan pengharapan kiranya akan dinikmati sepenuhnya.

Kepada Front Nasionalis kami sampaikan pengharapan, kiranya akan dapat mengambil perhatian terhadap adanya Ormas 2 PE TANI, BAGIUMBAK, ABUHI, SOKAMU, WUKUMAT, PARADAT, KILAS, itu untuk di laksanakan dalam keanggotaan proses Part II Gorontalo demikian dan untuk perluannya.

Tembusan :

1. Bupati Kepala Daerah di Gorontalo
2. Ban KODEM 1704 di Gorontalo
3. Kepala Kejaksaan Agung di Gorontalo
4. Menteri Dalam Negeri di Menado.-

SUSUNAN PENGURUS LENGKAP N.U. CABANG GORONTALO  
BERSERTA BADAN-BADANNYA

RAG. PELAJAR.-		RAG. MAJLIS RAKAT		RAG. MAJLIS RAKAT		RAG. MAJLIS RAKAT		RAG. MAJLIS RAKAT		RAG. MAJLIS RAKAT	
1. Ketua	: S.P.H. Dipoto	1. Ketua	: H.P. O U	1. Ketua	: H.P. O U	1. Ketua	: H.P. O U	1. Ketua	: H.P. O U	1. Ketua	: H.P. O U
2. Wk. Ketua	: Hs. Mile	2. Wk. Ketua	: H. Helingo	2. Wk. Ketua	: H. Helingo	2. Wk. Ketua	: H. Helingo	2. Wk. Ketua	: H. Helingo	2. Wk. Ketua	: H. Helingo
3. Wk. Ketua II	: L.J. Huncu	3. Penulis I	: S. Helingo	3. Penulis I	: S. Helingo	3. Penulis I	: S. Helingo	3. Penulis I	: S. Helingo	3. Penulis I	: S. Helingo
4. Wk. Ketua III	: A. Raji	4. Penulis II	: S. Helingo	4. Penulis II	: S. Helingo	4. Penulis II	: S. Helingo	4. Penulis II	: S. Helingo	4. Penulis II	: S. Helingo
5. Pembantu I	: S.K. Luma	5. Pembantu	: H. Helingo	5. Pembantu	: H. Helingo	5. Pembantu	: H. Helingo	5. Pembantu	: H. Helingo	5. Pembantu	: H. Helingo
6. Wk. Penulis I	: Sol. Jagu B.A.	6. Pembantu	: H. Helingo	6. Pembantu	: H. Helingo	6. Pembantu	: H. Helingo	6. Pembantu	: H. Helingo	6. Pembantu	: H. Helingo
7. Wk. Penulis II	: M. Rahim	7. Pembantu	: H. Helingo	7. Pembantu	: H. Helingo	7. Pembantu	: H. Helingo	7. Pembantu	: H. Helingo	7. Pembantu	: H. Helingo
8. Keuarasan	: M. Basalama T. D. U	8. Pembantu	: H. Helingo	8. Pembantu	: H. Helingo	8. Pembantu	: H. Helingo	8. Pembantu	: H. Helingo	8. Pembantu	: H. Helingo
9. D. A. W. A. H.	: M. N. Tambipi	9. Pembantu	: H. Helingo	9. Pembantu	: H. Helingo	9. Pembantu	: H. Helingo	9. Pembantu	: H. Helingo	9. Pembantu	: H. Helingo
10. W. A. R. A. T.	: M. N. Tambipi	10. Pembantu	: H. Helingo	10. Pembantu	: H. Helingo	10. Pembantu	: H. Helingo	10. Pembantu	: H. Helingo	10. Pembantu	: H. Helingo
11. D. A. R. U. N. U.	: M. N. Tambipi	11. Pembantu	: H. Helingo	11. Pembantu	: H. Helingo	11. Pembantu	: H. Helingo	11. Pembantu	: H. Helingo	11. Pembantu	: H. Helingo
12. M. B. I. N. G. E. N. K. E. N.	: M. Hamidun B.A.	12. Pembantu	: H. Helingo	12. Pembantu	: H. Helingo	12. Pembantu	: H. Helingo	12. Pembantu	: H. Helingo	12. Pembantu	: H. Helingo
13. I. S. L. A. M. A. T. I. N. I.	: M. N. Tambipi	13. Pembantu	: H. Helingo	13. Pembantu	: H. Helingo	13. Pembantu	: H. Helingo	13. Pembantu	: H. Helingo	13. Pembantu	: H. Helingo
14. M. A. S. I. F.	: M. N. Tambipi	14. Pembantu	: H. Helingo	14. Pembantu	: H. Helingo	14. Pembantu	: H. Helingo	14. Pembantu	: H. Helingo	14. Pembantu	: H. Helingo
15. M. A. S. I. F.	: M. N. Tambipi	15. Pembantu	: H. Helingo	15. Pembantu	: H. Helingo	15. Pembantu	: H. Helingo	15. Pembantu	: H. Helingo	15. Pembantu	: H. Helingo
16. S. P. A. N. S. H. O. R.	: M. N. Tambipi	16. Pembantu	: H. Helingo	16. Pembantu	: H. Helingo	16. Pembantu	: H. Helingo	16. Pembantu	: H. Helingo	16. Pembantu	: H. Helingo
17. P. E. R. T. A. N.	: M. N. Tambipi	17. Pembantu	: H. Helingo	17. Pembantu	: H. Helingo	17. Pembantu	: H. Helingo	17. Pembantu	: H. Helingo	17. Pembantu	: H. Helingo
18. S. A. R. B. A. N. I.	: M. N. Tambipi	18. Pembantu	: H. Helingo	18. Pembantu	: H. Helingo	18. Pembantu	: H. Helingo	18. Pembantu	: H. Helingo	18. Pembantu	: H. Helingo
19. P. A. L. O. D. I. N. G. E. R.	: M. N. Tambipi	19. Pembantu	: H. Helingo	19. Pembantu	: H. Helingo	19. Pembantu	: H. Helingo	19. Pembantu	: H. Helingo	19. Pembantu	: H. Helingo
20. L. E. S. B. U. M. A. I.	: M. N. Tambipi	20. Pembantu	: H. Helingo	20. Pembantu	: H. Helingo	20. Pembantu	: H. Helingo	20. Pembantu	: H. Helingo	20. Pembantu	: H. Helingo
21. S. E. R. W. E. M. I.	: M. N. Tambipi	21. Pembantu	: H. Helingo	21. Pembantu	: H. Helingo	21. Pembantu	: H. Helingo	21. Pembantu	: H. Helingo	21. Pembantu	: H. Helingo
22. B. E. R. G. U. N. U.	: M. N. Tambipi	22. Pembantu	: H. Helingo	22. Pembantu	: H. Helingo	22. Pembantu	: H. Helingo	22. Pembantu	: H. Helingo	22. Pembantu	: H. Helingo

Susunan Pengurus Lengkap Nahdlatul Ulama (NU) cabang Gorontalo beserta Badan-badannya, 4 Mei 1965.

Sumber: ANRI, NU 109



Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, berjalan bersama para pemuka agama Islam Gorontalo dalam rangka merayakan Hari Iedul Fitri, 1409 H, 2008

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo





Wakil Gubernur Gorontalo, H. Gusnar Ismail menerima Al Quran dengan terjemahan bahasa Gorontalo dari Departemen Agama, 30 Januari 2009

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo

# KEBUDAYAAN



Pakaian adat perempuan dari Gorontalo,  
1930

Sumber: ANRI, KIT 457/12



Sepasang pengantin Gorontalo  
1930

Sumber: ANRI, KIT 456/80



Kelompok penari Pajongs dari Gorontalo,  
1930

Sumber: ANRI, KIT 56/11



Salah satu jalan utama di Kota Gorontalo,  
1930

Sumber: ANRI, KIT 258/78



Pakaian tari seniman daerah Gorontalo,  
1930

Sumber: ANRI, KIT 412/46



Pertunjukan tari Tandoko yang merupakan salah satu  
tari khas Gorontalo,  
1930

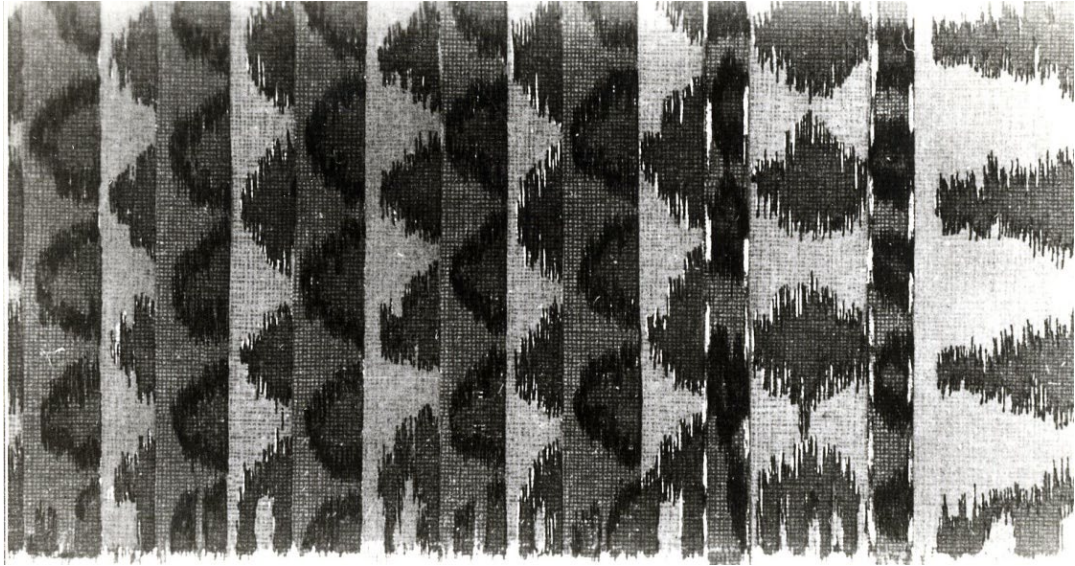
Sumber: ANRI, KIT 1093/84





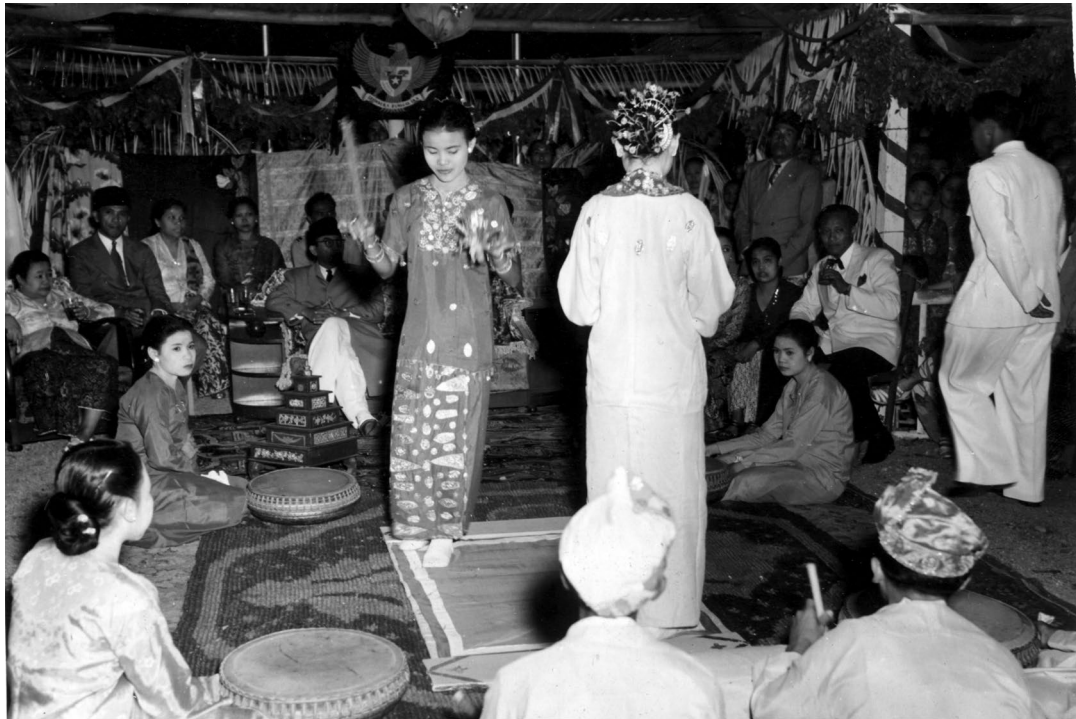
Motif khas kain sarung tebu ikat dari Limboto,  
1930

Sumber: ANRI, KIT 728/14



Motif khas kain tenun ikat Pilitota dari Gorontalo,  
1930

Sumber: ANRI, KIT 728/16



Pertunjukkan Tari Tidi Lo Polopalo oleh para gadis Gorontalo pada malam kesenian kunjungan Presiden Soekarno di rumah Kepala Daerah Gorontalo, 20 November 1951.

Sumber: ANRI, Kempen 511120 TT 1-17



Pertunjukkan Tari Rantai oleh para gadis Gorontalo pada malam kesenian kunjungan Presiden Soekarno di rumah Kepala Daerah Gorontalo, 20 November 1951.

Sumber: ANRI, Kempen 511120 TT 1-19



Penobatan Gubernur Gorontalo dengan acara Adat Gorontalo,  
Gubernur Gorontalo diiring para Seseputuh Gorontalo memasuki  
Gedung Pemerintahan Provinsi Gorontalo,  
17 Januari 2007

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo

# DAFTAR ARSIP

## **DAFTAR ARSIP CITRA GORONTALO DALAM ARSIP**

### **A. GEOGRAFI**

1. Pemandangan di sekitar Pantai laut di Teluk Gorontalo dengan tanggul penahan ombak, 1930  
Sumber: ANRI, KIT 946/23
2. Pantai laut dekat pegunungan di Gorontalo, 1930  
Sumber: ANRI, KIT 968/33
3. Aliran sungai di dataran rendah Gorontalo, 1931  
Sumber: ANRI, KIT 249/68
4. Aliran sungai di bawah kaki pegunungan di Gorontalo 1931  
Sumber: ANRI, KIT 249/70
5. Foto udara sebagian daerah Gorontalo, 1930  
Sumber: ANRI, KIT 56/19
6. Peta wilayah Gorontalo (Bagian dari Residensi Manado), 1941  
Sumber: ANRI, Dinas Topografi 2544
7. Peta wilayah Leok, Manado, 1941  
Sumber: ANRI, Dinas Topografi 2533
8. Peta Teluk Tomini, Gorontalo, 1941  
Sumber: ANRI, Dinas Topografi 2530
9. Peta Batas Manado-Gorontalo, 1946  
Sumber: ANRI, Dinas Topografi 2513

## **B. POLITIK DAN PEMERINTAHAN**

10. Bagian awal dan akhir dari Kroniek Gorontalo Tahun 1565-1681 yang ditulis oleh Sekretaris Residen Manado menjelaskan tentang politik yang terjadi di Gorontalo antara tahun 1565 s.d. 1681,  
**Sumber: ANRI, Gorontalo 18/4**
11. Bagian awal dari Perjanjian Ikatan Persahabatan antara Negeri Gorontalo dan Negeri Limboto, 12 Sya'ban 1084 H  
**Sumber: ANRI, Gorontalo 18/4**
12. Bagian awal Pertimbangan Gubernur Ambon W.S. Gianssen mengenai kedudukan Residensi Gorontalo, 25 Mei 1806.  
**Sumber: ANRI, Manado 66z**
13. Salinan Perjanjian/Kontrak antara Residen Ternate dengan paduka Kalim Tuba Putra Raja serta Boboto dari Bwool mengenai permintaan rakyat dari Bwool untuk mengangkat Kaum Tumba menjadi Raja Bwool, 10 Oktober 1811.  
**Sumber: ANRI, Manado 66**
14. Bagian awal konsep Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Alexander Gerard tentang penetapan pemisahan wilayah Gorontalo dan Limboto dari Karesidenan Ternate menjadi wilayah Karesidenan Manado, 14 Juni 1824.  
**Sumber: ANRI, Besluit. 14 Juni 1824 No. 10**
15. Surat Residen Manado kepada Gubernur Maluku tentang peraturan pusaka Gorontalo dan penunjukan Raja Limboto, 17 Januari 1828.  
**Sumber: ANRI, Manado 18/1**
16. Sebagian isi Besluit Residen Manado, Mulermaas, mengenai pengganti Raja Gorontalo, Abdul Nadjib Bakijanko yang telah wafat, 8 April 1831.  
**Sumber: ANRI, Gorontalo 2/1**



17. Catatan Harian Penguasa Sipil Gorontalo (F. Masselink) 1840 30 Juni 1846  
Sumber: ANRI, Gorontalo 3/8
18. Bagian awal Nota Residen Manado tentang Pemerintahan di Gorontalo, Limboto dan Boalemo, antara lain mengenai Raja-Raja yang berkuasa di ketiga negeri tersebut, 1853.  
Sumber: ANRI, Gorontalo 18/4
19. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 28 tentang vonis hukuman pengadilan terhadap orang-orang yang memberontak di Gorontalo, 4 November 1871  
Sumber: ANRI, Besluit 4 November 1871 No.28
20. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 11 tentang pembagian Afdeeling Gorontalo di bawah pimpinan Assisten Residen dengan ibukota Gorontalo dan dibagi menjadi 4 *onder-Afdeelingen* yaitu: Gorontalo, Boalemo, Kwandang dan Bwool dengan masing-masing distrik dan ibukotanya, 13 April 1911.  
Sumber: ANRI, Besluit 13 April 1911 No. 11
21. Laporan Kemajuan Distrik Gorontalo 1918  
Sumber: ANRI, BB 1124
22. Presiden Indonesia Timur, Tjokorde Gde Raka Soekawati disambut penduduk setempat saat berkunjung ke Desa Talaga sebuah desa kecil di dataran tinggi Gorontalo, 1948.  
Sumber: ANRI, RVD 1833
23. Ribuan penduduk datang untuk mendengarkan pidato Presiden Indonesia Timur Tjokorde Gde Raka Soekawati di Gorontalo, 1948.  
Sumber: ANRI, RVD 1844

24. Telegram Ketua Perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI Gorontalo kepada Ketua Delegasi RI tentang sumbangan rakyat Gorontalo untuk Republik Indonesia sebesar f.35.000, 5 September dan 9 November 1949.  
Sumber: ANRI, Delegasi Indonesia 817 dan 1158
25. Gubernur Sulawesi Sudiro dalam kunjungan kerjanya di Gorontalo disambut barisan kehormatan 29 Oktober 1951  
Sumber: ANRI, Kempen m 6243
26. Gubernur Sulawesi, Sudiro dengan rombongan mengunjungi daerah transmigrasi di Panguyaman, Gorontalo, 29 Oktober 1951.  
Sumber: ANRI, Kempen m 6250
27. Rakyat Gorontalo menanti kedatangan rombongan Presiden Soekarno di Pantai Gorontalo, 20 November 1951.  
Sumber: ANRI, Kempen 511120 TT 1-11
28. Presiden Soekarno disambut meriah oleh rakyat Gorontalo ketika tiba di Pantai Gorontalo, 20 November 1951.  
Sumber: ANRI, Kempen 511120 TT 1-8
29. Malam resepsi kunjungan Presiden Soekarno di rumah Kepala Daerah Gorontalo, 20 November 1951.  
Sumber: ANRI, Kempen 511120 TT 1-4
30. Sekretaris Jenderal Kementerian Penerangan Roeslan Abdulgani memberikan sambutan pada Rapat Umum yang dihadiri Presiden Soekarno di Gedung Bioskop Gorontalo, 20 November 1951.  
Sumber: ANRI, Kempen 511120 TT 1-5
31. Presiden Soekarno sedang berpidato pada Rapat Umum di Gedung Bioskop Gorontalo, 20 November 1951.  
Sumber: ANRI, Kempen 511120 TT 1-7

32. Gubernur Sulawesi, Sudiro bersalaman dengan pemuka-pemuka masyarakat Leok, Gorontalo, 19 Juni 1953.  
Sumber: ANRI, Kempen m 8631
33. Penyambutan Menteri Hardi oleh masyarakat Tapa, Gorontalo, Tampak hadir Nani Wartabone, Residen Koordinator Sulawesi Utara–Tengah, 12 Oktober 1958.  
Sumber: ANRI, Kempen 581012 TT 3
34. Wakil Perdana Menteri I Mr. Hardi didampingi Jenderal Gatot Soebroto dan Residen Koordinator Sulawesi Utara-Tengah, Nani Wartabone menuju rapat dinas di Gorontalo, 12 Oktober 1958.  
Sumber: ANRI, Kempen 581012 TT 12
35. Sambutan Residen Koordinator Sulawesi Utara - Tengah Nani Wartabone dalam rangka Rapat Dinas di Gorontalo, 12 Oktober 1958.  
Sumber: ANRI, Kempen 581012 TT 61
36. Wakil Perdana Menteri I Mr. Hardi sedang meninjau Jawatan Kehutanan Gorontalo, 12 Oktober 1958.  
Sumber: ANRI, Kempen 581012 TT 63
37. Menteri Negara Urusan Stabilisasi Ekonomi Kolonel Suprayogi meletakkan karangan bunga di Taman Makam Pahlawan Gorontalo, 12 Oktober 1958.  
Sumber: ANRI, Kempen 581012 TT 19
38. Wakil Perdana Menteri I Mr. Hardi berfoto bersama di depan rumah Residen Koordinator Sulawesi Utara Tengah Nani Wartabone sebelum meninggalkan Gorontalo, 12 Oktober 1958.  
Sumber: ANRI, Kempen 581012 TT 29
39. Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, menerima Penghargaan "Adipura" dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 25 April 2004  
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo

40. Pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, H. Idris Rahim oleh Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, di Gorontalo, 23 Januari 2006  
[Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo](#)
41. Pelantikan Gubernur Gorontalo, H. Fadel Muhammad dan Wakil Gubernur Gorontalo, H. Gusnar Ismail oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Ma'ruf, di Gorontalo, 28 Januari 2007  
[Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo](#)
42. Kantor Gubernur Gorontalo, 12 September 2007  
[Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo](#)
43. Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad menyerahkan Bendera Merah Putih kepada Tim Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-63, 17 Agustus 2008.  
[Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo](#)

### **C. PERDAGANGAN**

44. Rekening barang Residensi Gorontalo tahun 1800 antara lain mengenai pemasukan emas dan perak dari Manado dengan kapal Kora-kora.  
[Sumber: ANRI, Gorontalo 14](#)
45. Kontrak/Surat Perjanjian antara Raja Paduka Muhijuddin Muhammad Jair Iskandar Monoarjo dengan pemerintah Hindia-Belanda mengenai pertambangan emas, produksi kopi, 31 Desember 1819.  
[Sumber: ANRI, Ternate 131](#)
46. Jurnal Residen Gorontalo tahun 1836 antara lain tentang laporan muatan barang kapal yang datang ke Gorontalo. 18 September 1836  
[Sumber: ANRI, Gorontalo 9/4](#)

47. Sebagian isi Perjanjian Raja Bwool dengan Gubernur Maluku antara lain mengenai pasokan emas dari Bwool, 12 Nopember 1857.  
Sumber: ANRI, Ambon 1532
48. Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad menyaksikan pengapalan sapi Gorontalo yang akan diekspor, 28 Agustus 2007  
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo
49. Pengapalan jagung hasil produksi pertanian Provinsi Gorontalo yang akan diekspor di Pelabuhan Anggrek, Gorontalo, 28 Agustus 2007  
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo

#### **D. PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**

50. Laporan dari penguasa sipil tentang perikanan yang pertumbuhannya meningkat, 31 Desember 1845  
Sumber: ANRI, Gorontalo 3/2
51. Bagian awal Laporan Afdeeling Gorontalo tahun 1854 tentang perkebunan kopi, 1854  
Sumber: ANRI, Gorontalo 3/5
52. Simbol yang ditera di pohon kelapa di Gorontalo sebagai tanda inventarisasi pohon, 1930  
Sumber: ANRI, KIT 311/48
53. Wakil Perdana Menteri Mr. Hardi, Nani Wartabone, dan Jenderal Gatot Soebroto meninjau Waduk Irigasi di Tapa, Gorontalo, 12 Oktober 1958.  
Sumber: ANRI, Kempen 581012 TT 30
54. Tempat penggergajian kayu olahan hasil perkebunan di Gorontalo, 12 Oktober 1958.  
Sumber: ANRI, Kempen 581012 TT 65

55. Perkebunan tebu di Gorontalo, 14 September 1965  
Sumber: ANRI, Kempen 2b
56. Surat Persetujuan penanaman modal asing budidaya mutiara di Kabupaten Gorontalo, 10 Juli 1996  
Sumber: ANRI, Asmin 5149
57. Persetujuan penanaman modal asing bidang pembekuan dan pengolahan ikan di Kabupaten Gorontalo  
10 April 1997  
Sumber: ANRI, Asmin 5699
58. Penanaman perdana Padi Gilirang oleh Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, sebagai pencanangan dimulainya penggunaan bibit Padi Gilirang di Gorontalo, 28 September 2003  
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo
59. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo melakukan tanam perdana padi hibrida di Gorontalo, 15 Januari 2007  
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo
60. Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad melakukan panen perdana Jagung Hibrida di Gorontalo yang merupakan salah satu komoditi pertanian unggulan dari Provinsi Gorontalo, 11 Maret 2007  
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo
61. Kunjungan Kerja Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla ke Gorontalo, didampingi Gubernur dan Wakil Gubernur yang sedang mengamati hasil panen jagung Hibrida, 17 Oktober 2007  
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo

62. Panen perdana Cabe Merah Keriting Malita FM di Kebun Percontohan oleh Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, 21 Maret 2009  
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo

## **E. PERTAMBANGAN**

63. Bagian akhir dari Kontrak (Perjanjian) antara Raja Boalemo dengan Residen Manado tentang ijin pertambangan emas di Boalema, (ps 8), 9 Januari 1828.  
Sumber: ANRI, Kontrak Boalemo (Besluit 9 Januari 1828)
64. Bagian akhir Perjanjian (Kontrak) antara Raja Bone Bolango dengan Residen Manado tentang perjanjian perjalanan dalam rangka pengiriman hasil tambang, 29 Februari 1830.  
Sumber: ANRI, Kontrak Bolango (Resolusi 25 Februari 1830 No. 35)
65. Surat dari Penguasa Sipil kepada Raja Limboto mengenai penggalan emas di Sumolatta, 11 Februari 1841.  
Sumber: ANRI, Gorontalo 1/6
66. Kontrak Perjanjian antara Residen Manado dengan Raja Bwool tentang ijin pertambangan emas, 29 Juni 1891  
Sumber: ANRI, Kontrak Bwool (Besluit 29 Juni 1891 No. 19)

## **F. PERHUBUNGAN**

67. Pelabuhan kapal di Gorontalo, 1890.  
Sumber: ANRI, KIT 215/18
68. Kapal-kapal Phinisi sebagai salah satu alat transportasi laut untuk penumpang dan barang-barang yang melepas sauh di Teluk Gorontalo, 1930  
Sumber: ANRI, KIT 56/17

69. Perairan pintu masuk kapal di Teluk Gorontalo, 1930  
Sumber: ANRI, KIT 56/13
70. Kapal Penumpang Motor (KPM) *van Imhoff* di Teluk Gorontalo, 1930  
Sumber: ANRI, KIT 265/2

## G. KEAGAMAAN

71. Surat dari Asisten Residen Gorontalo kepada Residen Manado melaporkan tidak ada surat jalan yang diberikan kepada calon jamaah haji selama tahun 1864 dan tidak ada jamaah haji yang kembali dari Mekkah.  
4 Januari 1865.  
Sumber: ANRI, Manado 211
72. Susunan Pengurus Lengkap Nahdlatul Ulama (NU) cabang Gorontalo beserta Badan-badannya, 4 Mei 1965.  
Sumber: ANRI, NU 109
73. Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad, berjalan bersama para pemuka agama Islam Gorontalo dalam rangka merayakan Hari Iedul Fitri, 1409 H, 2008  
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo
74. Wakil Gubernur Gorontalo, H. Gusnar Ismail menerima Al Quran dengan terjemahan bahasa Gorontalo dari Departemen Agama, 30 Januari 2009  
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo

## H. KEBUDAYAAN

75. Pakaian adat perempuan dari Gorontalo, 1930  
Sumber: ANRI, KIT 457/12
76. Sepasang pengantin Gorontalo, 1930  
Sumber: ANRI, KIT 456/80
77. Kelompok penari Pajongs dari Gorontalo, 1930  
Sumber: ANRI, KIT 56/11



78. Salah satu jalan utama di Kota Gorontalo, 1930  
Sumber: ANRI, KIT 258/78
79. Pakaian tari seniman daerah Gorontalo, 1930  
Sumber: ANRI, KIT 412/46
80. Pertunjukan tari Tandoko yang merupakan salah satu tari khas Gorontalo, 1930  
Sumber: ANRI, KIT 1093/84
81. Motif khas kain sarung tebu ikat dari Limboto, 1930  
Sumber: ANRI, KIT 728/14
82. Motif khas kain tenun ikat Pilitota dari Gorontalo, 1930  
Sumber: ANRI, KIT 728/16
83. Pertunjukkan Tari Tidi Lo Polopalo oleh para gadis Gorontalo pada malam kesenian kunjungan Presiden Soekarno di rumah Kepala Daerah Gorontalo, 20 November 1951.  
Sumber: ANRI, Kempen 511120 TT 1-17
84. Pertunjukkan Tari Rantai oleh para gadis Gorontalo pada malam kesenian kunjungan Presiden Soekarno di rumah Kepala Daerah Gorontalo, 20 November 1951.  
Sumber: ANRI, Kempen 511120 TT 1-19
85. Penobatan Gubernur Gorontalo dengan acara Adat Gorontalo, Gubernur Gorontalo diiring para Sesepuh Gorontalo memasuki Gedung Pemerintahan Provinsi Gorontalo, 17 Januari 2007  
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Gorontalo

# PENUTUP

## **PENUTUP**

Program Citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan.

Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

“Citra Gorontalo Dalam Arsip” diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan menyebarkannya kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah. Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.